

BAB VIII

ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Ringkas Data Lapangan

Sesuai realitas data lapangan, “kehidupan buruh pabrik” merupakan fokus awal seluruh perhatian, aktivitas dan hasil temuan penelitian ini. Gambaran tentang kehidupan di daerah asal sebelum pergi ke kota, bagaimana proses yang mereka alami ketika mencari dan melamar pekerjaan ke sebuah pabrik atau perusahaan tertentu, suka duka dalam menjalani kewajiban kerja sehari-hari, tingkat upah dan kesejahteraan yang mereka dapatkan, pola tingkah laku dan pergaulan dengan kawan dan lingkungan sekitar, sesuatu yang menyenangkan dan memprihatinkan dalam menjalani semua kenyataan hidup dan lain sebagainya, adalah rentetan fakta empiris yang menjadi titik mula studi ini untuk lebih lanjut digali dan dirumuskan aneka permasalahan yang mereka hadapi dan rasakan sehari-hari.

Dengan menempatkan kehidupan buruh pabrik dalam perspektif pendidikan Islam, rangkaian aktivitas penelitian ini pada akhirnya menemukan 5 (lima) kategori permasalahan penting, yang kemudian diidentifikasi bersifat: *psikis*, *ekonomis*, *sosial*, *moral*, dan *religius*. Masalah psikis, antara lain muncul dalam wujud keterpaksaan yang dialami buruh pabrik, mulai dari pertama kali pergi ke kota karena sulitnya kehidupan di desa, ketika memperoleh tempat kerja seadanya berhubung tidak ada pilihan

lain, ketika menjalani aturan dan disiplin kerja yang sedemikian ketat, dan sebagainya. Masalah ekonomis terjadi, karena walaupun upah yang mereka dapatkan lebih banyak dibanding jika bekerja di desa, cenderung kurang atau bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan mengingat tingginya biaya kehidupan di kota. Masalah sosial misalnya ditandai oleh kesan tentang posisi mereka sebagai “*anak pabrikan*” yang mengandung konotasi rendah di masyarakat. Persoalan moral seringkali dipandang dan berakibat cukup serius, mengingat suasana pergaulan yang demikian bebas di kalangan sesama pekerja laki-laki maupun perempuan, di samping makin longgarnya norma-norma kehidupan di sekitar mereka. Persoalan religius juga tidak kalah pentingnya, seperti untuk dapat menunaikan shalat dengan tertib dan khusyu’ misalnya, seringkali harus disertai usaha sedemikian rupa di tengah lingkungan dan aktivitas kerja sehari-hari.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penelitian ini menemukan beberapa jenis lembaga atau kegiatan pembinaan keagamaan yang kemudian diidentifikasi sebagai embrio atau cikal bakal rekayasa model ideal *pesantren buruh pabrik* di masa depan. Institusi dan atau aktivitas pembinaan keagamaan tersebut adalah “*pesantren konvensional*” yang beralih fungsi sebagai tempat tinggal dan belajar keagamaan buruh pabrik, rumah kos-kosan yang dikelola secara Islami, pemanfaatan masjid atau mushalla di sekitar kawasan industri untuk pembinaan keagamaan, penyelenggaraan pembinaan keagamaan di lingkungan pabrik, serta keikutsertaan buruh dalam aktivitas keagamaan rutin di masyarakat tempat mereka tinggal sehari-hari. Harus diakui, tidak semua atau bahkan belum banyak jumlah buruh pabrik yang terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan keagamaan tersebut. Namun demikian, bagi penelitian ini, keterlibatan seperti itu sangat penting, karena dalam batas tertentu dapat menampilkan suasana religius dalam kehidupan buruh pabrik sehari-hari, dan sekaligus menjadi alternatif solusi permasalahan yang dihadapi.

Sedemikian bervariasinya model kelembagaan dan atau kegiatan pembinaan keagamaan di kalangan buruh pabrik, maka demikian pula halnya dalam hal unsur-unsur atau elemen yang menjadi pendukungnya. Buruh pabrik sebagai santri atau sebaliknya santri yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik, adalah elemen utamanya. Menyusul pihak kiai, ustadz, staf administrasi, dan tenaga pengelola lainnya. Adanya kurikulum dan metode pembinaan, didukung oleh sarana dan prasarana tertentu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah suasana kehidupan dan lingkungan sehari-hari yang senapas dengan tujuan pembinaan keagamaan tersebut dan idealitas ajaran Islam pada umumnya. Aktivitas pembinaan keagamaan dilaksanakan secara fleksibel, di sela-sela kesibukan para santri yang sekaligus pekerja industri, dengan materi pembinaan yang bersifat praktis, mencakup bidang akidah, ibadah, dan akhlak, sebagai upaya memperkokoh landasan religius dan moralitas buruh pabrik di tengah-tengah kehidupan urban yang cenderung semakin keras, banyak masalah dan godaan.

Kehadiran pesantren buruh pabrik, sesuai dengan asumsi awal penelitian ini, ternyata memang berperan sebagai alternatif jalur pemecahan masalah kehidupan yang dihadapi oleh kalangan pekerja industri. Masalah psikis seperti tersimpul dalam “serba keterpaksaan” di kalangan mereka, dalam batas tertentu dapat disublimasi melalui penanaman nilai-nilai keislaman, bahwa setiap jerih payah dan pengorbanan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, sesungguhnya merupakan ibadah yang berpahala besar, asal saja didasari oleh niat yang ikhlas, kejujuran, dan kesungguhan dalam melaksanakannya. Dengan memegang tata nilai kehidupan seperti ini, secara kejiwaan dapat mengurangi beban perasaan tertekan dan kecewa, untuk kemudian mengarah pada munculnya semangat kokoh dalam menghadapi realitas kehidupan yang memang tidak ringan.

Masalah ekonomis, misalnya dalam wujud ketidakseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari di kota, dapat dieliminasi dengan relatif lebih murah biaya hidup di lingkungan pesantren jika dibanding sewa kos. Sementara, melalui kebiasaan hidup tertib dan sederhana, dan sebaliknya menghindari kecenderungan berhura-hura (mubazir), mereka bisa menabung dan mengirimkan sebagian penghasilan ke rumah, misalnya untuk membantu ekonomi keluarga atau membiayai saudaranya yang masih sekolah. Data lapangan semacam ini cukup penting dan menarik untuk dicermati, mengingat banyak di kalangan buruh pabrik pada umumnya, yang begitu mudah menghabiskan hasil kerja untuk hal-hal yang kurang berguna, dan bahkan dapat menghancurkan masa depan mereka, seperti berjudi dan mabuk-mabukan.

Masalah sosial, seperti munculnya kesan status mereka sebagai “anak pabrikan” dengan konotasi kurang baik atau cenderung merendahkan, bisa diminimalisir mengingat pada diri mereka itu juga tersandang predikat lain sebagai “santri.” Bagaimana pun juga, santri adalah murid, pelajar atau siswa yang sedang menuntut ilmu pengetahuan di sebuah institusi atau aktivitas pendidikan tertentu, sehingga menimbulkan konotasi positif sebagai orang yang tengah melakukan sesuatu untuk meraih masa depan. Kesan lainnya adalah bahwa buruh pabrik yang tinggal di pesantren, biasanya cenderung berperilaku jujur (“alim”).

Dalam hal moralitas, mereka memang cenderung rentan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran norma, baik susila maupun agama. Namun, melalui pembinaan dan penciptaan suasana kehidupan Islami sedemikian rupa di lingkungan “pesantren”, akhirnya menghasilkan kumpulan sosok pribadi yang memiliki kesadaran dan sekaligus kemampuan mengendalikan diri dalam setiap langkah hidup mereka, sesuai dengan kemuliaan ajaran agama. Realita munculnya kelompok pekerja perempuan

yang berkerudung atau memakai jilbab di lingkungan industri sehari-hari, di satu sisi dapat dipandang sebagai gejala baru yang cukup menarik, dan sekaligus menandakan betapa sesungguhnya telah terjadi proses religiusitas atmosfer kehidupan di lingkungan pabrik, dengan berbagai efek positif yang ditimbulkan olehnya.

Dalam masalah agama, misalnya ditemukan sebuah ungkapan cukup populer dan sekaligus menjadi bagian integral dari materi bimbingan keagamaan di kalangan buruh pabrik, bahwa “bekerja merupakan ibadah dalam rangka mencari nafkah, bila ada lebihnya dikumpulkan untuk pergi ke Makah.” Di sini, agama diposisikan sebagai sumber motivasi, agar seseorang bekerja dengan penuh kesungguhan, mengingat hasil pekerjaan itu pada akhirnya juga sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan seseorang agar secara tuntas dapat menjalankan agama dengan baik. Pemecahan masalah agama, dengan demikian, bukan semata-mata ditujukan ke arah pembinaan ibadah mahdhah di kalangan santri pekerja, melainkan juga bagaimana mereka memahami ajaran Islam secara lengkap dan berimbang, demi pencapaian kebahagiaan hidup yang hakiki, dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, mengingat peran penting pesantren buruh pabrik sebagai alternatif pemecahan masalah kehidupan di kalangan pekerja industri, maka dipandang perlu adanya langkah perbaikan, pengembangan, dan penciptaan model ideal ke depan, agar peran yang dimainkannya kelak menjadi semakin maksimal. Arah penciptaan model pesantren buruh pabrik tersebut adalah bagaimana melengkapi dan menyempurnakan tujuan, materi, metode, sarana, dan prasarana pembinaan santri yang sekaligus pekerja itu, yang awalnya semata-mata terfokus pada bidang keagamaan menuju sasaran yang lebih luas dan komprehensif, mencakup peningkatan wawasan pengetahuan umum dan sekaligus penguasaan berbagai bidang keterampilan, sebagai upaya pemberdayaan dalam arti seluas-luasnya.

B. Refleksi Ciri Khusus Pesantren Buruh Pabrik

Untuk menempatkan hasil studi ini dalam setting dan kerangka pengembangan ilmu-ilmu sosial keagamaan di Indonesia, langkah pertama yang perlu ditempuh adalah bagaimana melakukan identifikasi atas temuan-temuan inti di lapangan, sehingga menjadi jelas keterkaitan dan posisinya dalam khazanah informasi keilmuan. Atas dasar fakta riil di lapangan, hasil analisis dan refleksi teoretisnya secara mendalam, studi ini menemukan sejumlah ciri khusus dari kehadiran “pesantren buruh pabrik” sebagai berikut.

1. Orisinalitas dalam Hal Institusi dan Fungsi

Apa yang dikenal sebagai “pesantren”, dalam pengertian institusi pendidikan Islam yang diselenggarakan secara tradisional, dengan mengutamakan aktivitas pengajaran kitab-kitab klasik berbahasa Arab,¹ juga perkembangan dan pengembangannya lebih lanjut sehingga ada yang kemudian melengkapi diri dengan madrasah, sekolah, pelatihan keterampilan, bahkan perguruan tinggi baik agama maupun umum, adalah sesuatu yang telah sedemikian terpahami keberadaannya oleh kalangan luas masyarakat negeri ini. Kesan dan konotasinya yang cukup menonjol, betapa pun sudah mengalami pembaharuan di sana-sini, tetap saja terpusat atau minimal tidak meninggalkan elemen-elemen pendukung aslinya, seperti ketokohan seorang kiai, keberadaan sekumpulan santri yang sedang mempelajari agama, tersedianya *bilik-bilik pemondokan*, terselenggaranya *pengajian kitab kuning*, dan dilengkapinya rumah ibadah baik masjid atau mushalla.² Gambaran sebuah pesantren dengan asosiasi pemahaman seperti

¹ Tentang “pesantren” sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, lihat, H.A.R.Gibb & J.H.Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J.Brill, 1965), 460-462.

² Lebih lanjut, lihat, Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 44.

itu, kiranya sudah lumrah dan tidak ada sesuatu yang sama sekali baru.

Akan tetapi, yang namanya “pesantren buruh pabrik” atau dapat juga disebut sebagai “pesantren industri”, boleh jadi masih terasa asing kedengarannya, mengingat belum akrab digunakan dalam jagad keilmuan dan wacana sosial keagamaan di Indonesia. Perpaduan istilah *pesantren* di satu pihak dan *industri* atau *buruh pabrik* pada pihak lain, bisa jadi pada tahap awalnya juga menimbulkan “keanehan”. Oleh karena, seperti yang sudah mapan terpahami selama ini, kata “pesantren” cenderung dikonosasikan sebagai peninggalan tradisi pendidikan kaum muslimin masa lalu yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan, dan menggambarkan suasana kehidupan abad pertengahan;³ sebaliknya kata “industri” atau “buruh pabrik” justru mengaromakan wajah dunia modern yang digerakkan oleh peradaban sekuler Barat, dan dalam banyak hal cenderung melahirkan corak kehidupan yang terbebaskan dari wilayah agama.⁴

Dengan adanya sesuatu yang terasa asing dan aneh itulah, maka kehadiran “pesantren buruh pabrik” yang menjadi salah satu fokus perhatian studi ini, satu segi mendapatkan pijakan rasionalitas untuk menyatakannya sebagai *temuan orisinal*, dengan kemungkinan sumbangannya guna memperkaya khazanah keilmuan sosial keagamaan di Indonesia. Kalaulah orisinalitas tersebut bukan terletak pada etimologi “pesantren” dan “buruh pabrik”, mengingat keduanya masing-masing secara terpisah merupakan kosakata lama yang sudah cukup terkenal di masyarakat, namun dari segi terminologi “pesantren buruh pabrik” sebagai institusi Pendidikan Islam dengan fungsi edukatif-

³ Lihat, Snouck Hurgronje, *Islam Hindia Belanda*, alih bahasa S. Gunawan, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, cet. II, 1983), 32.

⁴ Lihat, Peter L. Berger. *The Sacred Canopy*, (New York: An Anchor Book, 1990), 129.

sosiologis-keislaman yang sedemikian khas dan baru muncul belakangan ini, lagi-lagi semakin menjernihkan posisi dan predikat *orisinal*-nya.

Dan memang, ketika lembaga pendidikan Islam menampilkan wujud aktivitas dalam bentuk pengajian kitab secara murni di pesantren misalnya, atau kegiatan belajar-mengajar secara formal di madrasah, bahkan penyelenggaraan sekolah umum dengan berbagai jenis dan jenjang yang ada dari tingkat dasar atau malah taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, sesungguhnya adalah gejala dan realitas biasa yang sudah cukup dimaklumi adanya. Akan tetapi, pada saat kegiatan tersebut menjelma dalam wujud pembinaan keagamaan di sebuah lingkungan yang tertata dan dalam atmosfer keislaman sedemikian rupa, sementara kalangan santrinya sekaligus juga berstatus sebagai buruh pabrik, di mana kehidupan sehari-hari mereka bergerak di atas prinsip “belajar sambil bekerja” atau sebaliknya “bekerja sambil belajar”, maka jelas adanya sesuatu yang baru, dan di situlah letak orisinalitas institusi dan fungsi pesantren buruh pabrik sebagai dimaksud.

2. Fleksibilitas Lembaga Pesantren

Menempatkan orisinalitas pesantren buruh pabrik, dengan membatasinya semata pada aspek institusi dan fungsi, satu segi dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi lahirnya analisis untuk membangun refleksi keilmuan berikutnya, yakni penjelasan tentang fleksibilitas institusi pesantren. Dalam kaitan ini, munculnya realitas pesantren buruh pabrik, dapat dipandang sebagai bagian dari sederet bukti empiris, betapa jenis lembaga dan aktivitas pendidikan Islam yang sering diberi predikat “tradisional” ini,⁵ memiliki tingkat kelincahan dan kelenturan sedemikian

⁵ Tentang predikat “tradisional” yang sering dilabelkan pada pesantren di Indonesia, lihat, Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam: Studi tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional*, (Surabaya, Al-Ikhlash, 1993), hlm. 100-109.

rupa, dalam arti mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, termasuk perubahan apa pun yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

Bagaimana tidak, di celah-celah dunia industri yang terkenal *keras*, berorientasi *kebendaan* dan cenderung *sekuler*, ternyata lembaga pesantren dapat masuk dan berhasil mengembangkan aktivitas pembinaan keagamaan di kalangan para *santri* yang sekaligus berstatus sebagai *buruh pabrik* itu. Sulit terbayangkan pelaksanaannya, jika saja peran tersebut diserahkan, misalnya kepada lembaga pendidikan formal seperti *madrasah* dan *sekolah*, yang memiliki program berjenjang sedemikian ketat, dengan sejumlah persyaratan dan aturan yang diberlakukan kepada segenap murid atau siswanya.⁶ Padahal yang namanya *buruh* atau *pekerja*, apalagi di sektor industri yang memiliki tingkat kedisiplinan sedemikian tinggi, jelas tidak dapat begitu saja ditinggalkan dengan semaunya, walau untuk kepentingan belajar sekalipun. Dalam konteks lembaga pendidikan formal, pilihan bagi mereka yang sehari-hari berkedudukan sebagai pekerja semacam itu adalah: semata-mata belajar sesuai dengan aturan yang ada, atau memilih bekerja dan keluar dari madrasah atau sekolah yang bersangkutan.

Fleksibilitas atau kelenturan pesantren buruh pabrik, antara lain ditandai oleh pengembangan kreativitas internal lainnya, seperti ketika menyusun rancangan dan program pembinaan terhadap kalangan pekerja industri, dilakukan melalui pertimbangan rasional atas prinsip “keluwesan”, seperti dengan cara mengatur jadwal kegiatan sedemikian rupa, misalnya bagi mereka yang bekerja penuh di siang hari, aktivitas pembinaan dilakukan

⁶ Kritik terhadap kekakuan sistem dan kegagalan pendidikan formal persekolahan, khususnya jika dihubungkan dengan realitas kebutuhan dunia kerja di zaman modern dewasa ini, lihat, H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 15-17

pada malam hari, sementara mereka yang menjalani *shift* kerja malam hari, aktivitas pembinaan dilakukan pada siang hari. Intinya, ada kesadaran penuh tentang posisi dan kesibukan sehari-hari yang dialami oleh kalangan *santri-pekerja*, dalam keseimbangan sedemikian rupa dengan kesadaran yang sama atas pentingnya mereka terlibat dalam kegiatan pembinaan di lingkungan dan atau melalui aktivitas kepesantrenan.

Prinsip “memanfaatkan waktu luang”, tampaknya merupakan indikator penting bagi wujud fleksibilitas kehadiran pesantren buruh pabrik di tengah-tengah kesibukan dunia industri sebagai dimaksud. Waktu senggang di hari Ahad (Minggu) atau hari-hari libur pendek yang lain, manakala para *santri-pekerja* tidak pulang kampung atau menggunakannya untuk keperluan lain yang cukup urgen, pihak penyelenggara pesantren pun memanfaatkannya sedemikian rupa, misalnya untuk pengajian secara aksidental, pendalaman kemampuan baca al-Qur’an, pelatihan keterampilan berpidato, dan sebagainya. Dalam hal materi dan metode pembinaan yang dipilih dan diterapkan, semuanya didasarkan atas prinsip “keluwesan”, dan sebaliknya menghindari sedapat mungkin unsur “pemaksaan” oleh pihak pengelola pesantren dan “keterpaksaan” pada diri para *santri-pekerja*. Termasuk kategori fleksibel, ketika suatu program dirancang dengan mengingat relevansinya yang sedemikian besar bagi kepentingan para *santri-pekerja* di satu pihak, dan kemampuan untuk mempelajari dan menguasainya secara baik di celah-celah kesibukan kerja mereka sehari-hari pada pihak yang lain.

3. Prinsip Bekerja Sambil Belajar

Kehadiran buruh pabrik di tengah-tengah dunia industri, jelas secara umum bertujuan untuk *bekerja* guna mencari nafkah bagi kehidupannya. Karena itulah, wajar kiranya jika perhatian tertuju ke arah *pekerjaan*. Apa yang diperjuangkan dengan penuh

pengorbanan, mulai dari keberangkatan mereka ke kota, upaya mencari perusahaan yang kebetulan menerima tenaga baru, bersungguh-sungguh dalam memenuhi kewajiban sebagai pekerja dan lain-lain, semuanya merupakan konsekuensi logis dari keinginan sepenuh hati untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang cukup, guna memenuhi kebutuhan hidup yang dicita-citakan. Sehubungan itulah, penyelenggara pesantren buruh pabrik memahami sepenuhnya, bahwa santri binaan mereka bukanlah orang-orang muda yang datang ke situ semata-mata untuk maksud belajar, melainkan didasari oleh niat dan keinginan sedemikian rupa untuk memanfaatkan sela-sela waktu yang ada, guna menambah atau memperdalam ilmu dan amaliah keagamaan, sebagai pelengkap dan penyeimbang kesibukan sehari-hari, agar dengan demikian memperoleh keuntungan bagi kehidupan duniawi dan sekaligus ukhrawi.⁷

Prinsip *bekerja sambil belajar*, agaknya merupakan ungkapan yang tepat untuk merefleksikan apa yang sesungguhnya terjadi di kalangan para santri-pekerja itu, ketika mereka berduyun-duyun pergi serta dengan tekun bekerja di pabrik pada suatu saat, dan mengikuti aktivitas pembinaan di lingkungan pesantren pada saat yang lain. Menempatkan prinsip *bekerja* di rangkaian awal ungkapan tersebut, antara lain didasari oleh niat dan tujuan semula kalangan buruh pabrik itu, adalah untuk mendapatkan nafkah bagi kehidupan mereka. Bekerja untuk mencari nafkah, otomatis merupakan prinsip utama dan pertama. Setelah memperoleh dan terasa mapan bekerja di pabrik atau perusahaan tertentu, timbulah keinginan untuk memanfaatkan sela-sela waktu luang yang ada guna mengikuti kegiatan *belajar* di bawah bimbingan pesantren.

⁷ Salah satu prinsip ajaran Islam, adalah keharusan umatnya untuk mengupayakan dan menjaga keseimbangan hidup, antara urusan dunia di satu pihak dan urusan akhirat pada pihak lain. Lebih lanjut, lihat Md.Ali Alhamidy, *Jalan Hidup Muslim*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), hlm. 115.

Dalam kaitan ini, alur logikanya adalah: bekerja dahulu, dan begitu mendapat kepastian nafkah darinya, muncul keinginan untuk menggunakan sebagian guna kepentingan belajar.

Namun demikian, ada juga kemungkinan sebaliknya, di mana keinginan awal memang untuk belajar atau menuntut ilmu, khususnya di lingkungan pesantren. Tetapi karena hambatan biaya, maka dicarilah jalan keluar dengan mencari kerja di pabrik atau perusahaan. Hasil kerja itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus mendukung pendanaan bagi kepentingan belajar sebagai dimaksud. Dalam kemungkinan kategori semacam ini, yang terjadi sesungguhnya adalah sedemikian besar motivasi dan keinginan santri-pekerja untuk mempelajari ilmu dan amaliah keagamaan, dengan cara membiayai diri sendiri. Melalui penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja itulah, sesuatu yang dicita-citakan akhirnya terpenuhi.

Prinsip *bekerja sambil belajar*, atau sebaliknya *belajar sambil bekerja*, keduanya dimungkinkan, mengingat dalam perspektif ajaran Islam yang menjadi rujukan dunia pesantren, baik kegiatan “bekerja” maupun “belajar” sama-sama didasarkan, bernilai dan bertujuan *ibadah*. Bekerja untuk memperoleh nafkah kehidupan adalah perbuatan *ibadah*, demikian halnya belajar guna meningkatkan kualitas ilmu dan amaliah keagamaan. Sama-sama bernilai sebagai aktivitas *ibadah*, oleh karena itu keduanya memiliki keterkaitan sedemikian erat, bahkan dapat ditukar-balik rangkaian kata-kata atau ungkapannya. Idealitas keterkaitan di antara keduanya adalah: dengan bekerja di pabrik atau perusahaan, kalangan orang-orang muda itu bisa memanfaatkan sebagian hasilnya untuk kepentingan belajar di pesantren; sementara, dengan memanfaatkan sela-sela waktu untuk belajar di pesantren, diharapkan dapat menunjang kualitas dan keberhasilan kerja mereka di pabrik atau perusahaan.

4. Prinsip Belajar Sepanjang Hayat

Dalam perspektif pendidikan Islam, kesadaran seseorang untuk belajar pada saat tergolong usia dewasa dan sudah terjun ke dunia kerja seperti yang dilakukan oleh kalangan santri-pekerja itu, termasuk bagian dari perwujudan prinsip “belajar sepanjang hayat”, suatu langkah perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Efek positif dari kesadaran tersebut adalah, keselarasannya dengan tuntutan dunia modern, yang meniscayakan manusia untuk senantiasa menambah pengetahuan dan memperluas wawasan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas dan prestasi kehidupannya. Upaya meningkatkan kualitas dan prestasi kehidupan sebagai dimaksud, bukan saja terkait dengan kepentingan duniawi yang disadari berjangka pendek, melainkan sekaligus dan lebih dari itu juga untuk tujuan ukhrawi yang rentang waktunya tidak berakhir, alias bersifat kekal dan abadi.

Menurut konsep pendidikan, dan otomatis juga ajaran Islam, kewajiban belajar atau menuntut ilmu, rentang waktunya adalah mulai dari *buaian* sampai ke *liang lahat* (*minal mahdi ilal lahdi*). Hayat atau kehidupan, kalaulah tidak begitu tepat untuk dinisbatkan permulaannya dari awal eksistensi manusia di masa *bayi*, ketika masih dibuai atau di bawah ayunan sang ibu, sesungguhnya Islam lebih dari itu telah mengharuskan setiap muda-mudi atau calon pasangan suami-isteri, untuk memilih dan menentukan bakal jodoh masing-masing berdasarkan kriteria tertentu yang secara teoretis dan kebiasaan empiris dapat menjamin terciptanya kehidupan rumah tangga yang tenteram, saling mencintai, dan dirahmati Allah (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Ketika seseorang berada dalam proses pencarian jodoh atau calon pasangan hidupnya, jelas pada saat itu belum terjadi kelahiran seorang bayi, bahkan awal kehidupannya di dalam kandungan sekalipun. Jika saat pemilihan jodoh, sekaligus juga dipahami sebagai awal keharusan calon mempelai untuk mempersiapkan prakondisi bagi

masa depan putera-puteri mereka di kemudian hari, yang karena itu sering dipandang sebagai titik mula terjadinya aktivitas *pendidikan* bagi calon anak manusia (atau dengan kata lain *kewajiban belajar*), maka konsekuensi logisnya adalah, bahwa prinsip *belajar sepanjang hayat* memperoleh legalitas konsep dan realisasi atau pelaksanaannya yang sedemikian tuntas dalam pandangan ajaran dan pendidikan Islam.

Dalam kaitan prinsip *belajar sepanjang hayat*, kesadaran dan langkah kalangan santri-pekerja untuk melibatkan diri pada aktivitas pesantren di sela-sela kesibukan mereka bekerja di pabrik atau perusahaan, satu segi dapat dipandang sebagai wujud kepedulian mereka untuk melibatkan diri pada aktivitas pesantren di sela-sela kesibukan mereka bekerja di pabrik atau perusahaan, satu segi dapat dipandang sebagai wujud kepedulian mereka untuk memanfaatkan waktu di tengah rentang kehidupan (*hayat*), sehingga terjadi peningkatan kualitas kehidupan (*hayat*) itu sendiri dalam makna yang seluas-luasnya. Kehadiran institusi dan atau aktivitas pembinaan keagamaan seperti yang dilakukan oleh kalangan pesantren buruh pabrik, sehubungan itu, amatlah penting. Tanpa adanya lembaga dan atau kegiatan pembinaan keagamaan sebagai dimaksud, maka seperti halnya yang terjadi pada mayoritas kawan mereka sesama buruh pabrik, kecenderungan umumnya adalah menjalani kehidupan secara rutin dari rumah kos ke perusahaan, mulai dari bangun tidur, sarapan pagi, berangkat kerja, pulang, istirahat, makan, nonton televisi, jalan-jalan, atau mencari hiburan yang lain, dan akhirnya tidur kembali di malam hari. Tidak terlihat adanya kegiatan yang secara jelas terkait atau lebih khusus bernilai pendidikan dan pembinaan terhadap yang bersangkutan, sehingga menjadi sulit untuk menempatkan kelompok ini sebagai kumpulan individu yang sedang mengamalkan prinsip *belajar sepanjang hayat*.

5. Rekapitulasi Pesantren Masa Lalu

Identifikasi “pesantren buruh pabrik” sebagai orisinal dalam hal *institusi* dan aktualisasi *fungsinya* di lingkungan masyarakat industri, tidaklah dimaksudkan bahwa kehadirannya sama sekali terlepas dari akar sosio-historis masa lalu, khususnya dalam konteks perjalanan dan pasang surut dunia *pesantren* yang sedemikian panjang di kawasan Nusantara. Oleh karena, dengan adanya kecenderungan untuk menempatkan jalan historis pesantren sebagai identik dan bagian tak terpisahkan dari pasang surut sejarah kaum muslimin di negeri ini,⁸ maka salah satunya akan sampai pada gambaran tentang realitas lembaga pendidikan agama Islam “tradisional” tersebut yang kebanyakan berlokasi di pedesaan, dan karena itu erat keberadaannya dengan pola dan suasana hidup masyarakat pertanian.⁹ Keterkaitan sebagai dimaksud, antara lain tercermin dari keterlibatan sementara kalangan santri, misalnya dalam ikut menggarap atau mengerjakan sawah-ladang, baik milik kiai, para haji atau orang-orang kaya setempat, maupun milik anggota masyarakat pada umumnya.

Adakalanya, keterlibatan santri dalam kerja pertanian seperti itu, semata-mata didasari oleh niat pengabdian secara ikhlas, misalnya kepada kiai dan keluarganya, sebagai imbalan timbal-balik dari ketulusan mereka dalam mengajarkan dan membimbing keagamaan di pesantren; tetapi ada pula yang dilakukan dengan sadar dan sengaja, untuk mendapatkan upah atau penghasilan tertentu, baik dalam bentuk uang maupun barang (natura seperti padi atau beras), yang dengan begitu menjadi terpenuhilah bekal

⁸ Lihat Zamakhsyari Dhofier, “Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia,” dalam *Majalah Prisma*, No.3, Februari, 1986, hlm. 23.

⁹ Gambaran masa lalu dunia pesantren yang sedemikian erat keterkaitannya dengan wajah dan suasana kehidupan masyarakat tani di pedesaan, antara lain bisa dilihat, Sudjoko Prasodjo, dkk, *Profil Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 18. Juga, Fachry Ali & Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 35.

dan kebutuhan hidup sehari-hari selama menjalani kegiatan belajar di pesantren. Apa yang dilakukan oleh kalangan santri, dengan pola kehidupan di dunia pesantren masa lalu semacam itu, sesungguhnya juga mengandung arti dan masuk ke dalam simpul ungkapan “bekerja sambil belajar” atau sebaliknya “belajar sambil bekerja” sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

Maka berarti, kalau ada santri yang sehari-harinya mencari nafkah kehidupan sendiri, sementara masih sempat memanfaatkan sebagian waktunya untuk kegiatan belajar; atau sebaliknya berangkat dengan niat dan tujuan untuk belajar, namun mengingat ketiadaan biaya, lalu ditempuh melalui jalan sambil bekerja, sebenarnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, khususnya bila dicermati dari masa lalu dunia pesantren di negeri ini. Hanya objek atau jenis pekerjaannya saja yang berbeda: dari bidang pertanian, mungkin pernah juga bergeser ke bidang perdagangan, dan di zaman modern ini ada kecenderungan—minimal untuk sebagian—beralih sedemikian rupa ke bidang industri. Teori *rekapitulasi* sejarah kehidupan umat Islam di negeri ini, khususnya menyangkut hubungan pesantren dengan gerak perubahan masyarakat di sekitarnya, barangkali relevan untuk dipinjam guna memahami hal-ihwal yang terjadi sesungguhnya.

Dengan merujuk betapa *pesantren buruh pabrik* yang ada dewasa ini memiliki akar historis masa lalu, khususnya dilihat dari kehadiran santri di atas prinsip “belajar sambil bekerja” atau sebaliknya “bekerja sambil belajar” sebagaimana dikemukakan terdahulu, akhirnya sampai pada lingkup pemahaman lebih lanjut tentang *fleksibilitas* atau *kelenturan* jenis lembaga pendidikan Islam tersebut dalam beradaptasi dengan aneka macam situasi dan perubahan sosial yang terjadi hingga di zaman modern sekarang ini. Jika di awal dan menyertai pertumbuhan *pesantren konvensional*, ada santri yang belajar sambil bekerja di sektor pertanian, tidaklah mengherankan jika dewasa ini muncul *pesan*

tren industri yang santrinya belajar sambil bekerja di pabrik atau perusahaan. Dalam setiap perubahan zaman dan keadaan yang terjadi di negeri ini, tampaknya lembaga pesantren mampu melakukan penyesuaian diri sedemikian rupa, sehingga berhasil mempertahankan atau bahkan mengembangkan eksistensinya di tengah kehidupan masyarakat dari masa ke masa.

C. Pesantren Buruh Pabrik dalam Perspektif Pendidikan Islam

Selaras dengan munculnya beberapa prinsip kependidikan baru, sebagai bagian penting dari pengembangan sumber daya manusia di era global seperti *pendidikan untuk semua, menuntut ilmu sepanjang hayat, mengawalkan permulaan waktu belajar dan mengakhirkan penyudahannya, belajar untuk hidup, dan belajar tanpa batas*,¹⁰ kehadiran pesantren buruh pabrik, kiranya memiliki signifikansi tersendiri. Pemahaman ini, antara lain didasarkan pada kenyataan, betapa banyak kalangan pekerja yang terjun ke dunia industri dengan membawa permasalahan masa lalu di bidang pendidikan. Sebagaimana diketahui, mayoritas tenaga kerja di negeri ini kualifikasi pendidikan mereka tergolong rendah, sebagian besar karena kesulitan biaya. Dengan bekerja di pabrik, maka permasalahan ekonomi menjadi relatif terpecahkan, dan mengarah ke langkah positif manakala sebagian daripadanya dimanfaatkan untuk kembali menuntut ilmu pengetahuan yang dahulu pernah terputus karena faktor biaya.

Dalam perspektif pendidikan Islam, muncul dan berkembangnya pesantren buruh pabrik, secara khusus merupakan *langkah terobosan* dan sekaligus *jembatan baru* yang besar artinya, seperti

¹⁰ Tentang dinamika prinsip kependidikan yang terus mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, lihat, Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1987), hlm. i.

bagi pengembangan sumber daya insani, peningkatan kualitas kehidupan, pencegahan tindak kemaksiatan, dan respons konstruktif terhadap hari depan. Bagaimana memaknai keterkaitan pesantren buruh pabrik dengan dunia pendidikan Islam, atau lebih tegasnya menempatkan sudut pandang pendidikan Islam dalam memahami secara mendalam kehadiran pesantren buruh pabrik di kawasan industri modern dewasa ini, khususnya dalam lingkup beberapa peran tersebut di atas, secara berurutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Insani

Salah satu tugas dan fungsi pendidikan Islam yang utama adalah bagaimana mengembangkan potensi dasar manusia (*fitrah*) yang dibawa sejak lahir, agar tumbuh dan mencapai kesempurnaan secara maksimal, sebagai pribadi muslim yang paripurna, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam, jelas memerlukan proses dan usaha sedemikian untuk mencapainya. Harus dilakukan secara bertahap, cermat, dan penuh kesungguhan. Dalam perspektif inilah, ada titik relevansinya bagi sementara pendapat yang menyatakan, bahwa pendidikan Islam adalah terjemahan dari kata *tarbiyah* dalam bahasa Arab, yang diartikan sebagai perbuatan mendidik, mengasuh, dan menumbuhkan potensi manusia.¹¹

Kata *al-Tarbiyah al-Islamiyah* (pendidikan Islam), berasal dari akar kata *rabba, yurabbi, tarbiyah*, yang cakupan makna aslinya sangat luas; mengingat secara etimologi ada keterkaitan, misalnya dengan ungkapan *al-hamdu lillahi rabbi al-'alamin*,

¹¹ Aliah Scheifer, "The Role of Moslem Mother in Education in Contemporary Society," dalam *Muslim Education Quarterly*, Vol.V, No.2 (United Kingdom: The Islamic Academy, 1988), hlm. 34. Juga Syed Muhammad al-Naqib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, alih bahasa Haidar Bagir, penyunting Jalaludin Rahmat, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 75.

segala puji bagi Allah, *Tuhan* semesta alam.¹² Di situ, kata *Rabb* (*Rabbi*) diartikan dengan *Tuhan*. Padahal keberadaan dalam konteks semesta alam ini, sungguh memiliki peran yang sangat besar, luas, bahkan tak terbatas. Dalam kaitan manusia, jelas peran tersebut bukan terbatas pada perbuatan mendidik, mengasuh, dan menumbuhkan potensinya; melainkan juga melindungi, mengatur, membimbing, melimpahkan kasih sayang, menyediakan fasilitas kehidupan, dan lain sebagainya.

Dengan cakupan makna yang sedemikian luas, pendidikan Islam (*al-Tarbiyah al-Islamiyah*), secara teoretis memiliki konsep pengembangan sumber daya insani yang sangat komprehensif. Dalam konteks institusi dan aktivitas edukatif di pesantren buruh pabrik, terapan konsep teoretis semacam ini, antara lain terlihat dari munculnya kesadaran di kalangan santri-pekerja untuk senantiasa belajar dan mengembangkan diri di sela-sela kesibukan rutin sehari-hari, sementara kalangan ustadz atau pengelola pesantren berusaha mengajar dan membimbing mereka secara bijaksana dengan langkah serta perlakuan yang sebaik-baiknya. Pelaksanaan konsep *tarbiyah* di lingkungan lembaga dan kegiatan edukatif pesantren buruh pabrik, arahnya bukanlah sekedar bagaimana mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi sekaligus juga membimbing santri-pekerja agar hidup di atas jalan kebenaran, bersifat jujur, giat bekerja, bersikap hemat, rajin menabung dan semacamnya, sehingga diharapkan berujung pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya.

Di tengah citra kalangan buruh yang seringkali cukup memprihatinkan, seperti tergambar dari posisi mereka yang cenderung terjepit antara tuntutan *produktivitas kerja* di satu pihak, dan *ancaman kecelakaan* di pihak lain,¹³ maka pengembangan potensi

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Madinah: Mujamma' Khadim al-Haramain Asy-Syarifain li Thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif, 1983), hlm. 5.

dan sumber daya mereka, sebagai upaya keluar dari permasalahan yang senantiasa menjerat, dan selanjutnya berfungsi untuk bekal menyongsong hari depan yang lebih baik, merupakan langkah rasional sekaligus manusiawi. Oleh karena, soal produktivitas kerja dan sekaligus kemampuan menghindari kecelakaan di pabrik atau perusahaan misalnya, sebagaimana diketahui, berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kecermatan seseorang dalam menjalani profesi tersebut sehari-hari, yang bila dilacak akan sampai ujungnya pada kualitas sumber daya yang bersangkutan. Langkah yang ditempuh oleh pesantren buruh pabrik, dalam banyak hal memang terkait dengan upaya pengembangan sumber daya insani sebagai dimaksud.

2. Peningkatan Kualitas Kehidupan

Apa yang tergambar dari profil kehidupan buruh pabrik, dengan keharusan bekerja keras di satu pihak dan tingkat penghasilan yang kurang memadai pada pihak lain, sesungguhnya merupakan sesuatu yang acapkali cukup memprihatinkan. Akan tetapi, kalau dicermati secara mendalam, di saat mereka tinggal di desa atau daerah asal pun, juga sudah menghadapi banyak masalah, seperti begitu sulitnya mencari pekerjaan, prasarana kehidupan yang kurang layak apalagi memadai, gejala umum dekadensi moral di kalangan remaja dan sebagainya. Begitu sampai di kota dan memperoleh pekerjaan di sebuah kawasan industri, kualitas kehidupan buruh itu pun, menurut sementara pendapat justru mengalami kemerosotan, antara lain disebabkan oleh menonjolnya paradigma kapitalistik yang cenderung mengabaikan kebutuhan psikis dan humanitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

¹³ Razif, "Pengalaman Kelas Buruh dan Industri Manufaktur di Indonesia," dalam, Aris Wibawa, *Menuju Hubungan Perburuhan Demokratik*, (Yogyakarta: Fisipol Universitas Atmajaya & Laperia Pustaka Utama, 1998), hlm. 22-23.

¹⁴ Lihat, Seyyed Hossein Nasr, *Islam and The Plight of Modern Man*, (London: Longman, 1975), hlm. 77.

Terjadinya gejala dan proses dehumanisasi di kalangan buruh pabrik, antara lain ditandai oleh tercerabutnya kehidupan mereka dari akar-akar tradisi budaya semula, dan lebih dari itu juga terkikisnya nilai-nilai spiritual. Menurut bahasa psikoanalisis, kehidupan dunia industri yang bersifat mekanistik itu, cenderung melahirkan sosok manusia mesin, atau dalam istilah teknisnya disebut sebagai *homo mechanicus*, *automaton man*, dan *homo consumens*.¹⁵ Dalam ketidakberdayaan secara intelektual dan ekonomi, kalangan buruh pabrik tergiring untuk mengikuti irama kehidupan industri, di mana tanpa disadari telah mengidentikkan aktivitas rutin mereka sehari-hari dengan proses memproduksi sesuatu, yang prinsipnya adalah bagaimana dapat memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hitungan matematis kebendaan yang begitu dominan, menyebabkan derajat kemanusiaan mereka bergerak meluncur, menjadi tidak lebih sekedar barang.¹⁶

Dalam perspektif pendidikan Islam, kualitas kehidupan manusia diukur dari sejauh mana kesadaran, kesempatan, dan kemampuan yang bersangkutan dalam menegakkan prinsip-prinsip agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.¹⁷ Jadi, lingkup kriterianya mencakup segala aspek kemanusiaan yang hakiki secara *berimbang*, antara kebutuhan lahir dan batin, fisik-material dan sekaligus mental-spiritual, pemenuhan hajat kesejahteraan duniawi di satu pihak dan kebahagiaan ukhrawi pada pihak lain. Manusia wajib berikhtiar untuk mencapai kualitas hidup di dunia secara maksimal, tetapi jangan sampai membuat dirinya terlena, hanyut tanpa kendali, dan akhirnya terperosok ke jurang kesengsaraan yang justru bersifat kekal dan abadi. Menurut ajaran Islam,

¹⁵ Erich Fromm, *The Heart of Man: Its Genius of God and Evil*, (New York: Harper & Row, 1964), hlm. 57-59.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁷ Md. Ali Alhamidy, *Jalan Hidup Muslim*, hlm. 5-7.

dunia ibarat kebun untuk menanam kebaikan dan prestasi kehidupan, yang bakal dinikmati hasilnya kelak di akhirat.

Dicapainya kesadaran dan keberhasilan seseorang dalam memahami dan mengamalkan tata nilai yang menjunjung tinggi agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan sebagai kriteria meningkatnya kualitas kehidupan, jelas memberikan indikasi betapa kehadiran pesantren buruh pabrik membawa visi dan misi sedemikian rupa, khususnya dalam membangun dan menjaga keseimbangan hakikat dan makna hidup ini dalam arti yang sesungguhnya. Prinsip atau tata nilai agama, adalah pondasi dan tiang penyangga utamanya. Agama, dalam hal ini ajaran Islam, sangat mendorong penggunaan akal dalam mencapai prestasi kehidupan, menghormati hak hidup dan kehalusan budi manusia, melindungi harta benda selama diperoleh dengan cara dan dimanfaatkan untuk tujuan yang benar, dan menjaga kelestarian umat manusia di bumi ini melalui pengaturan tata cara berkeluarga yang sebaik-baiknya.

Dengan demikian, kehadiran pesantren buruh pabrik berfungsi ibarat sebuah jembatan penghubung, antara kehidupan dunia industri yang cenderung bersifat materialistis dan kering dari atmosfer spiritual di satu pihak, dan dunia keagamaan “*tradisional*” yang dalam banyak kasus cenderung miskin kebendaan namun kaya akan sentuhan ruhaniyah dan religius di pihak yang lain. Kemungkinan dunia industri dapat mengantarkan pelakunya untuk merengkuh kenikmatan duniawi, setidaknya yang tampak sekilas di permukaan, memang benar demikian adanya. Akan tetapi, perjalanan hidup manusia tidaklah selesai dan laik diukur hanya semata-mata atas dasar keberhasilan duniawi. Kehidupan akhirat yang jauh lebih panjang rentang waktunya, malah bersifat kekal abadi, tidak rasional kiranya jika diabaikan begitu saja, tanpa kesadaran untuk mempersiapkan bekal, sebagai kesinambungan dan bagian integral dari langkah dan perjuangan hidup di dunia.

Peningkatan kualitas kehidupan buruh pabrik, atau seluruh pelaku dunia industri pada umumnya, dengan demikian, mestilah diukur dan ditempatkan secara proporsional dari sudut pandang, bagaimana dan sejauhmana mereka berhasil mencapai prestasi profesional beserta akibat positifnya bagi kesejahteraan duniawi di satu pihak, dan bagaimana, serta sejauhmana keberhasilan tersebut dipadu dan dirangkai sedemikian rupa dengan kesadaran dan upaya mengharmoniskannya dengan ilmu dan amaliah keagamaan, sebagai pemberi sinar dan jalan terang mengenai hakikat sesungguhnya kehidupan ini pada pihak yang lain. Kehadiran buruh pabrik untuk bekerja di kawasan industri sebagai upaya mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang mereka alami sebelumnya, merupakan langkah awal untuk membangun kualitas kehidupan. Kesadaran untuk memilih tinggal dan memanfaatkan sebagian waktunya guna belajar di lingkungan pesantren, antara lain dalam rangka mengembangkan keterampilan profesi, adalah tahap ikhtiar berikutnya. Dan apa yang mereka lakukan untuk menyeimbangkan kesemuanya itu dengan pendalaman ilmu dan amaliah keagamaan, adalah proses akhir dari rangkaian upaya peningkatan kualitas kehidupan sebagai dimaksud dalam arti yang seluas-luasnya.

3. Pencegahan Tindak Kemaksiatan

Masyarakat industri yang dalam banyak kasus bersifat sekuler,¹⁸ cenderung menemukan lahan subur untuk berkembang ke arah yang sifatnya mendesak atmosfer kehidupan sakral, dan sekaligus mempersempit, serta melemahkan ruang gerak agama.¹⁹ Dari kecenderungan terciptanya kondisi seperti itulah, realitas

¹⁸ Lihat, Hermawan Sulistio, *Palu Arit di Ladang Tebu*, (Jakarta: KPG, 2000), hlm. 11.

¹⁹ Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, terjemah Abdul Muis Naharong, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 60.

umum kehidupan di lingkungan dunia industri, kalangan pekerja atau kaum buruh pada khususnya, sering ditemukan mengalami deviasi perilaku sehari-hari, seperti mabuk-mabukan dengan minuman keras atau obat terlarang, bermain judi, dan penyimpangan seksual.²⁰ Kemungkinan muncul dan membudayanya tingkah laku menyimpang, atau dalam bahasa agama disebut “tindak kemaksiatan” di kalangan mereka yang berprofesi dan hidup di lingkungan seperti itu, agaknya merupakan sesuatu yang sudah dianggap lumrah dan memang begitulah kebiasaan yang terjadi di mana-mana.

Atas dasar itulah, rencana atau upaya membangun pabrik, perusahaan atau lebih-lebih kawasan industri baru, cenderung diasosiasikan dengan bakal muncul dan menjamurnya berbagai jenis kemaksiatan di daerah tersebut, seperti diskotik, bar atau kelab malam, panti pijat, prostitusi, lokalisasi perjudian, dan warung-warung penjual minuman keras. Hampir-hampir selalu mengesankan adanya korelasi positif antara pembukaan, pengembangan dan kemajuan dunia industri di satu pihak, dengan muncul, tersebar, dan semakin merajalelanya perilaku maksiat di kalangan warganya pada pihak lain. Seolah-olah, kemaksiatan adalah syarat penting, tak terhindarkan, bahkan mutlak adanya bagi daerah atau wilayah manapun yang hendak menjadikan dirinya sebagai kawasan industri. Atau dengan kata lain, tanpa disediakannya sarana, pelaku, dan sentra-sentra kemaksiatan sedemikian rupa, industrialisasi tidak akan muncul di suatu kawasan, berkembang, dan mengalami kemajuan.

Sementara, entah secara kebetulan atau boleh jadi sudah tersurat dalam rencana Tuhan, daerah-daerah yang secara geografis maupun ekologis cocok untuk membuka dan mengembangkan

²⁰ Lihat, A. Hamid, *Agama dan Industrialisasi: Hubungan Pendidikan Islam dan Prilaku Seksual Pekerja Industri*, laporan hasil penelitian, (Surabaya: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, IAIN Sunan Ampel, 1996), hlm. 68.

kawasan industri, khususnya di persada Nusantara ini, banyak di antaranya justru berpenduduk mayoritas muslim yang taat atau dalam formulasi lain tergolong kategori *santri*.²¹ Bisa disebutkan, misalnya kawasan Batam di Riau, Pulo Gadung dan Tanjung Priok di Jakarta, kawasan Rungkut dan Tandes Surabaya, kawasan Buduran di Sidoarjo, Rembang di Pasuruan, Ngoro di Mojokerto, Kebomas di Gresik, kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) pada umumnya, atau lebih khusus lagi Pulau Madura yang ketika studi ini dilakukan juga tengah dirancang sebagai kawasan industri baru, semua daerah tersebut sejak masa lalu atau asal mulanya dihuni oleh kaum muslimin yang mayoritas tergolong santri atau taat beragama.

Begitu terjadi proses industrialisasi, dalam banyak hal, atau bahkan segala sesuatunya mengalami perubahan. Bukan terbatas pada timbulnya akselerasi kemajuan dan naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama yang memang sejak mula ingin dicapai, melainkan bersamaan dengan itu juga terjadi kemerosotan moral, yang secara mencolok ditandai oleh bermunculan dan maraknya tindak kemaksiatan di masing-masing kawasan tersebut. Kecurigaan, keengganan, dan malah kebencian kalangan santri, lebih-lebih para tokoh dan ulamanya, terhadap munculnya sentra-sentra pengembangan industri di negeri ini, sesungguhnya bukan karena anti kemajuan, melainkan didasari oleh kesan, pengetahuan dan fakta empiris yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri, betapa kehidupan masyarakat yang sehari-harinya terlibat dalam aktivitas keduniaan di bidang industri, memang kenyataan banyak di antara mereka terlibat dalam kemaksiatan sebagai dimaksud.

²¹ Sementara definisi menyatakan, santri adalah orang Islam yang memeluk agamanya dengan penuh kesungguhan, taat menjalankan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Lihat, Zaini Muchtarom, *Santri dan Abangan di Jawa*, (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1988), hlm. 5-8.

Dalam perspektif pendidikan Islam, yang namanya “perbuatan maksiat” apapun wujudnya, jelas merupakan sesuatu yang harus dicegah, dihindari, dan sedapat mungkin ditempuh jalan secara bijak untuk mengikisnya dari panggung kehidupan ini. Oleh karena, sebagaimana tersurat dalam al-Qur’an, surat asy-Syams ayat 8, Allah mengilhamkan kepada setiap diri manusia dua pilihan jalan hidup sekaligus, yaitu *kefasikan* dan *ketaqwaan*.²² Melalui dua pilihan tersebut, berarti ada *kebebasan* dan sekaligus *keadilan* bagi siapa pun untuk menentukan dan menempuh jalan hidup, apakah ingin menuju ke arah *surga*, atau sebaliknya memang sudah mantap sedemikian rupa untuk menjadi penghuni *neraka*. Adalah sesuai dengan prinsip kebebasan dan keadilan, jika seseorang berjuang keras dalam hidup ini untuk senantiasa menjadi hamba yang *bertakwa*, dan karena itu memperoleh balasan surga kelak di akhirat. Begitu pula sebaliknya, prinsip kebebasan dan keadilan pastilah berkata, merupakan konsekuensi logis untuk mendapat hukuman neraka bagi siapapun yang membiarkan diri bergelombang dalam *kefasikan*, *kemaksiatan*, dan *perbuatan dosa*.

Kaidah *amar ma’ruf nahi munkar*, atau lengkapnya *al-amru bi al-ma’ruf wa al-nahyu ‘an al-munkar*, artinya mengajak dan mendorong ke arah perbuatan baik dan sebaliknya mencegah atau melarang perbuatan jelek, memang begitu sentral posisinya dalam ajaran Islam, dan secara otomatis juga institusi dan aktivitas pendidikannya. Pada lingkup pesantren buruh pabrik, adalah perbuatan *ma’ruf* dan mengarah terwujudnya *ketaqwaan*, ketika seorang kiai atau para ustadz membimbing kalangan santri-pekerja untuk senantiasa memperkokoh iman, memperluas ilmu pengetahuan, dan menjadikan diri mereka terampil dalam melakukan amal kerja sesuai dengan profesi yang digeluti sehari-hari. Sementara, upaya menuju ke arah tersebut akan terhambat atau

²² Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 1064.

bahkan gagal, manakala tindak kemaksiatan dan kemungkaran tetap berkembang merajalela. Atas dasar itulah, diperlukan upaya penguatan trilogi *iman, ilmu, dan amal*, melalui pemupukan di bidang *akidah*, pembiasaan sedemikian rupa dalam hal *ibadah*, dan pembudayaan hidup di atas prinsip *akhlaqul karimah*.

Selaras dengan apa yang *tersurat*, dan boleh jadi juga yang sesungguhnya *tersirat* atau dikehendaki oleh isyarat ayat suci al-Qur'an tersebut, bahwa di situ penempatan kata kefasikan (*fujur*) terletak dalam posisi di muka atau lebih dulu daripada kata ketaqwaan (*taqwa*). Tidak ada yang tanpa makna dan tujuan, dari apa dan bagaimana sesuatu termaktub dan disusun tata letak redaksinya sedemikian rupa dalam kitab suci al-Qur'an. Sehubungan itu, kefasikan (*fujur*) terletak di bagian awal, dan baru disusul ketaqwaan (*taqwa*) sesudahnya, oleh karena menurut realitas empirik yang gampang sekali dilihat pada kenyataan sehari-hari, bahwa kecenderungan anak manusia untuk berperilaku jelek dan bila dibiarkan tanpa kontrol atau bimbingan akan menjadi pribadi yang jahat, dalam praktik lebih besar dari kemungkinan alternatifnya untuk berusaha menjadi orang baik dan terpuji, yang hidupnya bermanfaat bagi kepentingan agama, masyarakat, dan bangsa.

Atau dalam formulasi lain, untuk menjadi orang jelek atau bahkan jahat yang segenap rentang hidupnya dipenuhi oleh tindak kemaksiatan dan kefasikan, biasanya tidak memerlukan energi khusus, upaya terencana, dan pembiayaan yang disiapkan sedemikian rupa. Tidak pernah terdengar yang namanya kursus atau sekolah kejahatan. Begitu seseorang membiarkan diri atau terjerumus ke lembah kejelekan, seperti melalui pergaulan tanpa dirancang dan sengaja dengan orang-orang jahat, maka begitu mudah baginya untuk kemudian menjadi penjahat pula. Sementara itu, untuk menjadi orang baik, katakanlah yang beriman, berilmu dan beramal saleh dalam perjalanan hidupnya, jelas memerlukan

proses, usaha dan perjuangan, yang seringkali disertai oleh banyak pengorbanan. Di sinilah letak rasionalitas-teoretis dan sekaligus realitas-empirisnya, mengapa istilah kefasikan ditempatkan dalam posisi lebih dahulu dari istilah ketaqwaan sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut di atas.

Kehadiran aktivitas pendidikan Islam, yang dalam kaitan ini diwakili oleh pesantren buruh pabrik, boleh dikatakan mengemban peran sebagai pihak yang berdiri antara dua kemungkinan berkembangnya potensi dasar manusia: apakah cenderung ke arah *fujur*, di mana kemaksiatan atau kefasikan inklusif ke dalamnya; atau kebalikan dari itu bergerak ke arah *taqwa*, termasuk bagaimana menyelamatkan santri-pekerja dari tindak kemaksiatan, melalui pengokohan *iman, ilmu, dan amal saleh* yang diselarasakan dengan implementasi prinsip akidah Islamiyah, pembiasaan ibadah menurut ketentuan yang ada, dan upaya menghias diri dengan akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif tata nilai pendidikan Islam, makna kehadiran pesantren buruh pabrik dengan tugas sebagai institusi pencegah tindak kemaksiatan di kalangan santri-pekerja, di samping mengarah pada tercapainya “*kesucian diri*” yang berkonotasi kepentingan akhirat, sekaligus juga diharapkan berefek positif terhadap upaya penciptaan di kalangan kondisi psiko-fisik yang memungkinkan dicapainya peningkatan kualitas profesional mereka dalam kerja industri sehari-hari. Arah tujuan yang terakhir ini dimungkinkan, mengingat perbuatan maksiat seperti pergi ke tempat-tempat hiburan malam, apalagi disertai mabuk-mabukan akibat minuman keras atau obat terlarang, seringkali menyebabkan seseorang pada saat bekerja dihindangi kelelahan luar biasa, mengantuk yang tidak tertahankan, rasa mual ingin muntah dan sejenisnya, yang semua itu dapat mengganggu atau bahkan membahayakan keselamatan yang bersangkutan, misalnya ketika sedang mengoperasikan mesin industri.

4. Respons Konstruktif terhadap Hari Depan

Munculnya pesantren buruh pabrik di berbagai kawasan industri dewasa ini, satu segi dapat dimaknai sebagai bentuk respons konstruktif dunia pendidikan Islam terhadap hari depan *perkembangan internalnya* di satu pihak, dan sekaligus merupakan wujud inovasi kreatif guna lebih memapankan *peran eksternalnya* bagi kesejahteraan masyarakat secara hakiki pada pihak yang lain. Kedua bentuk respons konstruktif tersebut, antara satu dengan lainnya saling berkaitan. Pengembangan internal dunia pendidikan Islam melalui kehadiran pesantren buruh pabrik, adalah keniscayaan yang sedemikian penting artinya bagi eksistensi lembaga itu di masa depan. Sementara, keberadaan suatu institusi dan aktivitas pendidikan di tengah realitas kehidupan pada akhirnya diukur dari apa dan sejauh mana sumbangan yang berhasil diberikan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang sebenar-benarnya.

Nilai konstruktif pesantren buruh pabrik bagi pengembangan internal dunia pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, secara umum terlihat dari peran strategis yang dimainkannya dalam ikut mencari jalan keluar dari berbagai krisis atau persoalan serius yang dihadapi,²³ misalnya oleh kalangan pesantren konvensional, madrasah dengan seluruh jenis dan jenjangnya, lembaga pendidikan umum milik organisasi keagamaan, dan sekian bentuk institusi serta aktivitas pendidikan Islam baik yang bersifat *in* atau *non-formal*, seperti yang berjalan di lingkungan keluarga, majelis taklim di masyarakat, dan lain sebagainya. Menurut sementara

²³ Sungguhpun dalam banyak hal, dunia pendidikan Islam telah mengalami kemajuan dibanding keadaannya pada masa lalu, namun persoalan yang dihadapinya masih atau bahkan semakin banyak, lebih-lebih di zaman modern dewasa ini. Lebih lanjut, lihat, Syed Sajjad Husain & Syed Ali Ashraf, *Krisis Pendidikan Islam*, alih bahasa dan penyunting, Rahmani Astuti, (Bandung : Risalah, 1986), hlm. 3-4.

hasil analisis,²⁴ beberapa masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam, dalam posisinya selaku subsistem dan bagian integral dari realitas pendidikan di Indonesia, antara lain meliputi: kecenderungan menempatkannya dalam lingkup terpisah dari aspek kehidupan yang lain, seolah ada tembok pemisah antara sekolah dengan masyarakat, corak kurikulum yang menitikberatkan dimensi pengetahuan dan kecerdasan, arah pembentukan jiwa priyayi yang kerjanya di belakang meja, kegiatan belajar dibatasi oleh dinding kelas dan halaman sekolah, masih kuatnya dualisme antara pendidikan umum dan agama, sistem evaluasi yang terfokus pada kemampuan intelektual, menghasilkan lulusan yang serba canggung sehingga menimbulkan pengangguran, dan kesempatan serta keberuntungan cenderung berpihak kepada mereka yang mampu secara ekonomi maupun sosial.

Keterpisahan dunia pendidikan formal dengan aspek kehidupan yang lain, terlihat misalnya dari struktur bangunan fisik suatu madrasah atau sekolah, di samping pola hidup dan tata perilaku sehari-hari di kalangan warga penghuninya, yang mengesankan fungsi tunggalnya sebagai tempat persemaian generasi elite masa depan, sementara realitas kecenderungan masyarakat menghendaki terintegrasikannya semua itu dengan apa yang ada pada mereka, agar tercipta suasana kondusif bagi kemungkinan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain, demi kemajuan bersama di masa depan. Begitu lepasnya keterkaitan antara dunia sekolah dengan masyarakat, sehingga yang namanya “partisipasi bersama” dalam penyelenggaraan pendidikan, kecuali pada kasus sekolah atau madrasah swasta, sejauh ini sangatlah minim.²⁵

²⁴ Fuad Armyari, “Keharmonisan Lingkungan Sebagai Determinan Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan: Suatu Analisis Dari Pandangan Islam,” dalam, Pusat Studi Interdisipliner Tentang Islam IAIN Sunan Ampel, *Pembangunan Pendidikan dalam Pandangan Islam*, (Surabaya: Indah Offset, 1986), hlm. 51-52.

²⁵ Lihat, H.A.R.Tilaar, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 13.

Timbulnya kesan begitu kuat, seolah-olah ada tembok atau dinding pemisah antara dunia sekolah di satu pihak, dengan denyut kehidupan riil di tengah masyarakat pada pihak lain, telah menjadi sebab munculnya berbagai konsekuensi yang kurang menguntungkan, di mana masing-masing cenderung berjalan sendiri, tanpa saling berhubungan, apalagi menunjukkan kepedulian satu terhadap lainnya. Kalaulah terjadi hubungan, paling-paling terbatas pada kalangan tokoh masyarakat atau pejabat tertentu, dalam fungsi misalnya sebagai ketua badan penyantun sekolah, atau memang harus berbuat sesuai ketentuan untuk mengurus bidang-bidang khusus dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan, karena memang didasari alasan dan motivasi tugas.

Sebagai akibat dan konsekuensi logis dari keterpisahan dan adanya tembok pembatas semacam itu, maka dalam hal kurikulum dunia sekolah pun, substansi materinya cenderung kurang relevan dengan kebutuhan peserta didik kelak sesudah lulus dan terjun ke masyarakat. Apa yang diajarkan kepada mereka seperti biologi, matematika, dan ilmu pengetahuan sosial, dalam banyak kasus kurang mendukung atau bahkan tidak berkaitan sama sekali, ketika akhirnya memasuki dunia kerja yang relatif membuka kesempatan dewasa ini, misalnya di pabrik atau perusahaan, menjadi wiraswasta mandiri, dan lain sebagainya. Kalau pada ujungnya seseorang harus bergulat dengan, katakanlah *angkat-junjung* karung di pabrik, menjajakan dagangan di sebuah gerobak kecil, apalagi sekadar mengandalkan otot untuk mengayuh becak, lalu apa hubungan antara yang dahulu dipelajari dan keperluan praktisnya untuk mencapai keberhasilan dalam pekerjaan yang dijalani sekarang.

Dunia pendidikan formal di Indonesia, hingga masa studi ini dilakukan, masih cenderung berorientasi pada terbentuknya *output* peserta didik yang kurang atau bahkan tidak bersifat mandiri. Terkait dengan corak kurikulum yang pada umumnya diberlakukan, begitu seseorang lulus dari sekolah atau bahkan perguruan

tinggi, bayangannya adalah melamar dan diterima untuk bekerja di sebuah kantor, duduk manis di belakang meja, dan mendapat sebutan atau minimal kesan sebagai priyayi. Padahal jelas, formasi kerja yang sifatnya instan seperti itu, dalam kenyataan hanya sedikit dan akan semakin langka, mengingat kecenderungan terjadinya perampangan birokrasi di mana-mana, sesuai tuntutan globalisasi yang mengharuskan segala kerja dan urusan diselesaikan menurut prinsip efektivitas dan efisiensi. Timbullah kesenjangan, ketidakberdayaan mencari jalan keluar, dan akhirnya kekecewaan banyak orang yang terlibat dalam aktivitas persekolahan itu sendiri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan prakarsa dan keberanian sebegitu rupa, untuk “mendobrak” tembok pembatas antara dunia pendidikan formal di satu pihak, dan realitas kehidupan dengan berbagai aspeknya di tengah masyarakat pada pihak lain. Keberadaan ruang kelas dan halaman sekolah, tidak boleh dipandang sebagai keharusan bagi peserta didik untuk selalu berkulat di dalamnya, melainkan dimulailah upaya membiasakan mereka untuk belajar, mencoba, berlatih, dan mempraktikkan segala sesuatu yang tengah atau telah dipelajari dalam *setting* kehidupan yang sebenarnya. Konsep pendidikan sistem ganda (PSG), kiranya menjadi salah satu alternatif jalan keluar. Tekun belajar di lingkungan kompleks sekolah memang penting, tetapi memahami penerapan ilmu misalnya di sawah, pasar, kantor, pabrik dan sejenisnya, juga tidak kalah pentingnya.

Dalam perspektif demikian itulah, kehadiran pesantren buruh pabrik memiliki peran konstruktif, bukan saja dalam wujud fungsi riilnya sekarang sebagai sentra pengajaran, pelatihan, bimbingan, dan keteladanan bagi kalangan santri-pekerja, yang berarti telah menampilkan konsep “pendidikan” dalam pengertian dan aplikasinya yang luas, menyangkut pengembangan teori keilmuan dan realisasi praktik amaliahnya di tengah kehidupan; melainkan sekaligus juga membuka alternatif ke depan tentang bagaimana

mengaktualisasikan konsep pendidikan sistem ganda sebagaimana yang dimaksud dalam bentuk idealnya yang benar-benar mendekati kesempurnaan. Maksudnya, kehadiran pesantren buruh pabrik dimungkinkan kelak akan menjadi “jembatan penghubung” yang teoretis *oriented* di satu pihak, dan dunia industri sebagai medan pengalaman lapangan yang berorientasi praktis di pihak lain.

Oleh karena, kenyataan tetap saja menunjukkan, bahwa realisasi konsep pendidikan sistem ganda, yang salah satu program unggulannya adalah menempatkan peserta didik untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan praktik atau magang, katakanlah di kantor atau perusahaan, masih sering mengalami hambatan, di mana tidak setiap sekolah memiliki keberanian dan kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan mitra praktik yang diinginkan-nya, sementara itu tidak setiap kantor atau perusahaan bersedia dan siap menerima kehadiran murid-murid yang hendak kerja magang di tempatnya. Melalui upaya pengembangan model ideal pesantren buruh pabrik di masa depan, misalnya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai di sebuah lahan khusus yang disiapkan sedemikian rupa pada setiap hendak membangun kawasan industri, disertai manajemen pengelolaan secara profesional, kiranya merupakan alternatif dan terobosan baru dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut.

Idealitas model pesantren buruh pabrik seperti dimaksud, jika akhirnya benar-benar dapat diwujudkan, betapa pun akan tetap menampilkan wajah dan sifat aslinya sebagai institusi pendidikan dalam pengertian yang luas. Sementara, penempatan lokasinya di kawasan industri, sekaligus akan mempermudah penataannya sedemikian rupa, sehingga benar-benar merefleksikan atmosfer kehidupan industrial, sedapat mungkin seperti apa adanya. Kalaulah tetap sulit untuk dapat memboyong, katakanlah seluruh murid sekolah untuk tinggal di kompleks pesantren buruh pabrik tersebut selama atau dalam rangka kerja praktik mereka,

paling kurang dapat dimintai bantuannya sebagai tempat transit sementara atau sewaktu-waktu, sehingga tetap saja mampu berperan untuk *memperpendek jarak*, antara dunia pendidikan formal di satu pihak dan dunia kerja riil di lapangan pada pihak yang lain.

Dengan memaknai kehadiran pesantren buruh pabrik melalui sisi kreativitas-inovatifnya sebagaimana tergambar di atas, kiranya akan bermanfaat bagi pengembangan dan masa depan dunia pendidikan pada umumnya, internal pendidikan Islam khususnya. Dalam perspektif internal pendidikan Islam, hal sedemikian itu sungguh amat berarti. Oleh karena, lebih dari kesan lemahnya peran yang mampu dimainkan dunia pendidikan secara umum, internal pendidikan Islam justru dibebani lagi oleh citra historis sosiologisnya yang kurang menguntungkan selama ini, seolah merupakan “sisa peninggalan masa lalu” yang cukup jauh, dengan sejumlah indikator ketidakberdayaannya yang seringkali memang sulit terbantahkan. Melalui kemungkinan terobosan yang dapat dimainkan oleh pesantren buruh pabrik seperti itu, diharapkan bakal semakin terbukalah pintu-pintu baru yang dapat dilalui dalam rangka mengembangkan peran konstruktif dunia pendidikan Islam pada masa yang akan datang.

D. Dialog Islam dan Modernisasi

Kehadiran *pesantren buruh pabrik* di kawasan industri dewasa ini, secara makro dapat dimaknai sebagai wujud *dialog* antara *Islam* sebagai agama yang berakar pada masa lalu yang cukup jauh di suatu pihak, dengan *modernisasi* yang merupakan produk dan simbol kemajuan manusia di zaman mutakhir dewasa ini pada pihak yang lain. Gambaran tentang bagaimana terjadinya proses dialog, lika-liku, serta produk akhir yang dihasilkannya, sungguh menarik untuk dicermati. Mengingat di samping kemungkinan terjalannya hubungan yang bersifat saling memahami, menerima dan memberi antara Islam dengan modernisasi; tidak

jarang pertemuan keduanya juga menimbulkan kecurigaan dan salah paham, ketegangan, dan bahkan pertentangan. Dengan munculnya apa yang dalam studi ini disebut sebagai “pesantren buruh pabrik”, terbukalah kesempatan untuk melihat dan mengamati secara mendalam, bagaimana sebenarnya proses dan produk dialog sebagai dimaksud. Lebih jelasnya, hendak dirinci uraiannya sebagai berikut:

1. Titik Awal Memasuki Dialog

Pertemuan yang melahirkan hubungan dialogis antara Islam dengan modernisasi dalam wujud kehadiran pesantren buruh pabrik, paling awal dapat dilacak dari perpaduan dan terjalannya dua kata: *pesantren* dan *buruh pabrik*. Istilah *pesantren*, atau sering juga disebut *pondok pesantren*,²⁶ sejauh ini cenderung dikonotasikan sebagai institusi pendidikan Islam yang sarat dengan nilai-nilai dan corak tradisionalitasnya seperti banyak berlokasi di pedesaan, dikelola sedemikian rupa dengan mempertahankan tradisi masa lalu secara turun-temurun, dan berorientasi kepada pengajaran ilmu-ilmu keagamaan, khususnya yang terhimpun dalam “kitab kuning”. Sementara, *buruh pabrik* menggambarkan profesi kerja dunia modern di perkotaan, dengan tata kehidupan dan pola budaya yang dalam banyak hal kontras atau malah bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh dunia pesantren.

Namun begitulah kenyataannya, dua kosakata yang secara historis-kultural berasal dari masing-masing entitas yang berbeda itu, akhirnya menemukan wadah “perkawanan” di tengah kesibukan dunia industri, ketika zaman sudah menjadi sedemikian modern dewasa ini. Istilah “pesantren buruh pabrik”, akhirnya muncul atau sengaja ditampilkan ke permukaan, mengingat begitulah

²⁶ Tentang penggunaan istilah pesantren dan atau pondok pesantren, lebih jauh lihat, Sudjoko Prasodjo, dkk, *Profil Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 16.

kalangan yang terlibat dalam institusi edukatif-keislaman itu cenderung mengidentifikasi diri, atas dasar kenyataan dilakukannya aktivitas pembinaan keagamaan bagi *para santri-pekerja*. Digunakannya istilah “pesantren”, yang secara etimologi berasal dari *pe-santri-an*, yakni tempat berkumpulnya sekelompok santri,²⁷ karena memang di situ ada sekumpulan orang dengan posisi selaku murid atau peserta didik yang melakukan aktivitas belajar agama Islam.²⁸ Kenyataannya, sekumpulan orang itu adalah mereka yang sekaligus berkedudukan sebagai *buruh* pada sektor industri di lingkungan pabrik atau perusahaan tertentu. Karenanya, istilah “*buruh pabrik*” dipakai, dalam rangka memberi sifat atau ciri khusus bagi kehadiran institusi dan aktivitas edukatif-religius tersebut, sehingga menjadi jelas identitasnya di tengah sekian jenis lembaga pesantren yang ada di negeri ini.

Apakah setiap kelompok orang yang berkumpul dalam rangka mempelajari agama Islam, bisa disebut “santri” dan tempat belajarnya dinamakan “pesantren”? Dari sinilah, titik awal terjadinya dialog mulai tampak; dengan kemungkinan munculnya variasi pendapat antara yang menolak dan menyetujuinya. Bagi kalangan yang cenderung menolak penggunaan istilah dan pemahaman semacam itu, barangkali didasari alasan, bahwa selain istilah *santri toh* masih ada sebutan lain, misalnya *siswa* atau *murid*, yang juga biasa dipergunakan untuk menamai mereka yang tengah belajar di lembaga pendidikan Islam. Mengingat, kalau sekadar orang berkumpul guna mempelajari ilmu agama Islam, bisa jadi belum layak disebut sebagai santri, karena untuk sampai ke predikat itu

²⁷ Arti *pesantren* sebagai tempat berkumpulnya para santri untuk belajar agama Islam, lihat, Manfred-Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta:P3M, 1986), hlm. 16.

²⁸ Dalam konotasi edukatif-keislaman, santri adalah sebutan khusus untuk murid-murid sekolah agama-Islam. Lihat, Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, alih bahasa S. Gunawan, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983), hlm. 25.

diperlukan syarat, yakni sudah melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan penuh ketaatan. Padahal, mereka yang sedang belajar semacam itu, logikanya pastilah masih dalam proses menuju ke arah sana; jadi belum sampai dan mencapai kategori santri dengan konotasi sebagai dimaksud.

Selaras dengan penetapan kriteria tersebut, maka istilah “pesantren”—menurut kelompok ini—hanya dipergunakan secara khusus untuk menyebut institusi pendidikan Islam yang dikelola secara “tradisional”, dengan elemen pendukung terdiri dari: kiai dibantu oleh para stafnya, sejumlah santri yang tengah mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, kamar-kamar pemondokan untuk tempat tinggal mereka, rumah ibadah baik masjid ataupun mushalla, dan pengajaran kitab kuning yang merupakan ciri khasnya,²⁹ sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Gambaran riil perwajahan dalam konotasi pengertian seperti ini, misalnya adalah Pesantren Tebuireng di Jawa Timur dan Pesantren Krapyak di Yogyakarta. Pesantren Gontor, Ponorogo, yang cukup besar dan amat terkenal itu pun, kenyataannya mengidentifikasi diri dengan sebutan “pesantren modern”, karena memang ada ciri khas yang membedakannya dengan pesantren “tradisional” dan atau “konvensional” yang jauh lebih banyak jumlahnya di negeri ini. Apakah dalam makna dan pengertian seperti itu, pesantren buruh pabrik memenuhi syarat-syarat dan kriteria sebagai dimaksud?

Sebaliknya, bagi orang yang setuju penggunaan istilah “pesantren buruh pabrik”, boleh jadi akan bertolak dan memegang pengertian “santri” dalam konteks edukatif-religius, sebagai orang yang tengah mempelajari ilmu dan amaliah keagamaan di sebuah institusi dan aktivitas pendidikan Islam dengan ciri-ciri seperti tersebut di atas, tetapi minus keharusan penuh untuk menjadikan “kitab kuning” sebagai materi utama pengajarannya. Dalam kono-

²⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 44.

tasi pengertian seperti ini, gambaran fisik dan atmosfer kehidupan sehari-hari di lingkungan “pesantren buruh pabrik” seperti dimaksud, memang tidak secara mutlak persis sama dengan apa yang biasa terjadi dan dirasakan di lingkungan “pesantren konvensional”. Di samping tetap kelihatan unsur-unsur kesamaannya, ada juga nuansa perbedaan pada segi tertentu, sebagai manifestasi dan konsekuensi logis terjadinya dinamika internal dunia pesantren, sesuai dengan realitas perubahan zaman dan keadaan.

Kemungkinan dipergunakannya istilah “pesantren buruh pabrik” dalam konotasi pengertian semacam itu, di sisi lain juga dapat dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga “pesantren” pada umumnya, yakni berusaha membentuk peserta didik dan masyarakat luas agar menjadi pemeluk agama Islam yang berkategori “santri”, dan bukan sekedar “muslim” dalam pengakuan dan catatan formal belaka. Padahal jelas, yang namanya peserta didik ataupun anggota masyarakat itu ada di mana-mana, hidup dalam lingkup zaman dan keadaan yang berbeda-beda. Dengan menerima kenyataan munculnya jenis “pesantren buruh pabrik” dewasa ini, berarti ada kearifan dan kelenturan dunia pesantren itu sendiri, untuk senantiasa mengemban tugas mulianya di tengah kehidupan yang terus berubah.

2. Dialog Psikologis

Perjumpaan antara dunia *pesantren* dengan kehidupan *buruh pabrik*, atau *Islam* dengan *modernisasi* dalam format semacam itu, bukanlah terjadi dan melahirkan jalinan begitu saja secara tiba-tiba. Melainkan, pada awal mula gerakan modernisasi lewat jalur industri digulirkan oleh pihak pemerintah, pernah terjadi “keterkejutan” sedemikian rupa di kalangan institusi keislaman dan sejumlah tokoh kaum muslimin, yang diekspresikan dalam bentuk kritik tajam dan bahkan perlawanan terhadapnya. Program industrialisasi selaku motor penggerak modernisasi, ketika itu

dipandang sebagai “ancaman” terhadap eksistensi agama dalam arti yang seluas-luasnya.³⁰ Sejumlah kasus, seperti dalam wujud terisolasi dan kemudian bubarnya *pesantren tradisional* yang kebetulan berlokasi di sekitar kawasan industri baru, sering ditunjuk sebagai bukti nyata betapa ancaman tersebut memang ada, dan meninggalkan bekas kekecewaan, dendam, kebencian, dan kepedihan di kalangan pihak-pihak yang menjadi pendukungnya.

Bagi sementara kalangan institusi dan tokoh keagamaan, hadirnya proyek-proyek industri besar akan menimbulkan gangguan serius terhadap akidah, ibadah, dan akhlak masyarakat, generasi muda kaum muslimin pada khususnya. Dari keteguhan iman kepada Tuhan yang direalisasikan misalnya dalam bentuk ketekunan ibadah di masjid atau mushalla, kebiasaan mengaji al-Qur’an dan mempelajari ilmu agama di rumah-rumah, di pesantren atau madrasah, dan penerapan akhlaqul karimah dalam pergaulan hidup sehari-hari, akhirnya bergeser ke fokus kesenangan duniawi secara berlebihan dan sulit dikendalikan, seperti kecenderungan berlomba-lomba mengejar harta, menggunakannya untuk kepentingan maksiat, disertai munculnya aneka hiburan malam, tempat perjudian, lokalisasi pelacuran, warung-warung penjual minuman keras, yang biasanya diikuti oleh maraknya tindak kriminalitas.³¹

³⁰ Gambaran betapa khawatir dan cemasnya umat beragama, khususnya di kalangan pimpinan institusi keislaman dan para tokoh kaum muslimin, terhadap dampak negatif industrialisasi sebagai bagian penting dari program modernisasi di Indonesia ketika pertama kali digulirkan oleh pemerintah, lihat, A. Mukti Ali, *Pelbagai Persoalan Islam di Indonesia Dewasa ini*, (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1971), hlm. 5.

³¹ Dalam sebuah analisis keilmuan, ada sementara ahli yang sampai pada kesimpulan, bahwa industrialisme dapat melahirkan bahaya, antara lain dalam wujud *potensialities for evil*, akar masalah bagi munculnya segala benih kejahatan. Lihat, Barry Smart, *Modern Conditions: Postmodern Controversies*, (London: Routledge, 1992), hlm. 28.

Semua itu terjadi, karena industrialisasi berasal dari peradaban Barat yang dikenal berpandangan sekuler, tidak peduli atau malah banyak di kalangan pelakunya yang acuh atau bahkan menolak agama dan berbagai ikatan tradisi yang menyertainya.³² Sementara pihak-pihak yang pertama kali membawa, memasukkan ke Indonesia, dan menerapkannya dalam program modernisasi ekonomi berskala besar, juga orang-orang yang dikenal tidak begitu akrab dengan pola kehidupan religius dan kecenderungan mayoritas kaum santri di negeri ini, seperti konglomerat Cina, kalangan teknokrat sekuler, pelaku bisnis kelompok abangan, dan lain sebagainya.³³ Di lain pihak, kaum santri sendiri jarang memiliki kemampuan ilmu maupun teknis untuk bergabung dalam pengelolaan industri tersebut, mengingat latar belakang sejarah dan proses pendidikan yang tidak menguntungkan bagi mereka, jauh sejak masa penjajahan dahulu sampai ketika program industrialisasi mulai gencar dilaksanakan.³⁴

Padahal sesuai dengan fakta historis dan juga kesadaran umum yang tumbuh di masyarakat, andil dan jasa umat Islam termasuk kalangan ulama dan para santri dalam perjuangan kemerdekaan di negeri ini, sangatlah besar.³⁵ Bahkan karena begitu gigih menentang penjajahan, akhirnya terjadi proses “uzlah” di kalangan kiai dan lembaga pesantren, dengan kepergian mereka

³² Lihat, Kenneth Thomson, “Religion, Values, and Ideology,” dalam, Stuart Hall, et.al (eds.), *Modernity: An Introduction to Modern Societies*, (Cambridge: Blackwell Publisher Inc, 1996), hlm. 398.

³³ Dalam realitas sosiologis di Indonesia, perbedaan paham, tata kehidupan dan persaingan antara kaum *santri* dengan *abangan* dan juga kalangan *nasionalis sekuler*, adalah fakta yang memang demikian adanya dari masa ke masa. Lihat, antara lain, Abdurrachman, *Kepemimpinan Dalam Administrasi Pembangunan di Jawa Timur*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1982), hlm. 40-41.

³⁴ Lihat, Nurcholish Madjid, dkk, *Aspirasi Umat Islam*, (Jakarta: Leppenas (Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional, 1983), hlm. 3.

³⁵ A. Mukti Ali, *Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Nida, 1971), hlm. 18-19.

untuk menyingkir ke wilayah pedesaan, ada kalanya sampai ke pelosok nun jauh dari kota atau pusat kekuasaan, sebagai wujud oposisi dan sikap patriotis yang tidak mengenal kompromi.³⁶ Tetapi karena justru sedemikian konsisten memegang prinsip, tidak mau berkolaborasi dengan penjajah dan kaki tangannya itulah, di kemudian hari mengalami kondisi yang cukup fatal dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akhirnya tersingkir dari orbit kehidupan modern, antara lain sebagaimana tercermin dari ketidakmampuan mereka untuk ikut terlibat dalam pengelolaan industri tersebut.

Bagaimana pun juga, efek psikisnya yang sangat mendalam adalah timbulnya perasaan kecewa, marah, sakit hati, dan benci di kalangan kaum santri ketika itu. Di depan mereka hadir tantangan industrialisasi yang diketahui bakal mengganggu dan malah memporak-porandakan eksistensi agama dengan nilai-nilai sakral dan tradisi religiusnya yang dipegang teguh oleh masyarakat. Industrialisasi itu berasal dari peradaban masyarakat sekuler yang dahulu pernah datang dan menduduki negeri ini sebagai penjajah. Pembawa dan yang pertama kali memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi berskala besar, juga bukan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan secara akidah dan pola kehidupan budaya dengan kaum muslimin. Justru sebaliknya, banyak kalangan non-Islam, kelompok sekuler atau *priayi abangan*, yang jika dilacak masa lalu historis mereka, boleh jadi adalah keturunan orang-orang yang mempunyai kedekatan hubungan dan pernah diuntungkan oleh kaum penjajah. Wajarlah kiranya, jika perasaan kesal, marah, dan sakit hati, pernah menyelimuti kehidupan kaum muslimin di negeri ini menyertai hadirnya program industrialisasi.

Namun demikian, ada masanya benturan semacam ini terjadi dan menyeruak ke permukaan, kemudian mengalami proses

³⁶ Fachry Ali & Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam di Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 35.

secara alami sedemikian rupa, untuk mencapai “*suasana netral*” melalui tahap-tahap penyesuaian diri sedemikian rupa, sampai pada suatu ketika masing-masing pihak mulai sadar dan melihat adanya peluang yang dapat dimanfaatkan untuk saling mengisi, guna mencapai tujuan lebih besar yang sama-sama diinginkan. Begitulah yang terjadi, berderet kamar hunian di “pesantren konvensional” yang pernah bubar dan ditinggalkan oleh para santrinya itu, akhirnya dialihfungsikan sebagai bilik kos-kosan bagi kalangan buruh pabrik yang sengaja mencari tempat tinggal dengan suasana dan atmosfer kehidupan Islami, sambil mempelajari ilmu dan amaliah keagamaan di sela kesibukan kerja sehari-hari.

Dalam perkembangan selanjutnya, ada sementara tokoh agama yang tertarik untuk membangun kamar-kamar sewaan atau semacam kompleks indekos, yang pengelolaannya mirip sebuah pesantren. Pemanfaatan masjid atau mushalla sekitar untuk tujuan pembinaan keagamaan di kalangan pekerja, juga merupakan alternatif yang muncul berikutnya. Pihak perusahaan pun, ada sementara yang sadar, memandang penting, dan kemudian menyelenggarakan aktivitas pembinaan keagamaan untuk para karyawannya. Di luar semua itu, masih tersedia kemungkinan lain bagi siapa pun untuk memperoleh pengembangan ilmu dan amaliah yang baik, misalnya dengan keterlibatan mereka dalam jam’iyah keagamaan yang diselenggarakan secara rutin di tengah kehidupan masyarakat sekitar kawasan industri. Dari model dialog kreatif yang disertai ketegangan dan tarik-ulur secara dinamis semacam itulah, akhirnya terjadi bentuk perkawanan dan jalinan fungsi antarperadaban, dalam hal ini *Islam* dan *Barat*, yang direpresentasikan melalui pesantren buruh pabrik.

3. Dialog Edukatif

Bisa dikatakan, pesantren buruh pabrik yang muncul dan eksis dewasa ini, sebenarnya merupakan hasil dari “dialog” secara

dinamis dan kreatif antara *dunia pesantren konvensional* di satu pihak dan *dunia industri* pada pihak yang lain. Pertemuan dua sosok tradisi yang latar belakang historis dan realitas sosiologisnya jauh berbeda atau bahkan kontras itu, terjadi melalui tahap-tahap pematangan diri sedemikian rupa, dengan berpijak atas prinsip kesediaan untuk saling *memahami, menerima, dan memberi* antara satu dan yang lain. Sebagai tradisi baru, baik dalam perspektif dunia pesantren yang sarat muatan spiritual-religius maupun dunia industri yang rasional-sekuler, ia hadir atau dihadirkan oleh dan di tengah realitas zaman modern lewat proses yang bersifat *dialektif, akomodatif, tetapi juga kritis*.³⁷

Kesediaan untuk saling memahami, menerima, dan memberi dalam sebuah pergumulan yang bersifat dialektif, akomodatif, dan kritis itu, terlihat misalnya ketika pesantren buruh pabrik akhirnya berhasil merumuskan *tujuan, sistem kelembagaan, kurikulum, metode, sarana, teknik evaluasi, dan penataan lingkungan* sedemikian rupa, yang di satu pihak merupakan *akomodasi* nilai-nilai kehidupan kaum santri untuk disesuaikan dengan realitas kepentingan kerja buruh pabrik, tetapi di lain pihak juga terus membuka kemungkinan terjadinya dialog kritis dalam wujud tarik-menarik dan saling mempengaruhi antara keduanya lewat sebuah format dialektika sosio-edukatif-religius yang bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu.

Suatu ketika, kurang lebih pada tahun tujuh puluhan di abad ke-22, dunia pesantren “konvensional” di sekitar kawasan industri baru harus bersedia menerima kenyataan, di mana para santri yang semula tekun duduk bersila di serambi masjid mengitari sang kiai dalam sebuah pengajaran “kitab kuning”, ternyata mengalami degradasi sedemikian rupa dan akhirnya bubar, satu per satu

³⁷ Pembahasan tentang bagaimana suatu atau beberapa tradisi bermetamorfosis menjadi sebuah “tradisi baru”, lihat misalnya, Edward Shils, *Tradition*, (Chicago: The University of Chicago, 1981).

pulang ke rumah atau pindah ke pesantren lain yang belum “tercemar” oleh pola kehidupan masyarakat “pabrikasi” yang cenderung tidak peduli terhadap nilai-nilai keagamaan. Kenyataan pahit tersebut, rupanya tidak berjalan terus-menerus. Oleh karena, pada sekitar tahun sembilan puluhan di abad yang sama, sudah mulai terlihat kecenderungan baru di kalangan sementara masyarakat industri negeri ini, akan munculnya sebuah kesadaran dan penilaian, betapa tata kehidupan religius yang indah dan syahdu di masa lalu, terasa begitu penting untuk digapai dan disemaikan kembali, sebagai pengimbang atmosfer modernisasi dengan berbagai dampak negatifnya yang sering menjengkelkan, namun sudah terlanjur menjadi kenyataan.

Maka, lahirlah gagasan dan aktualisasinya dalam wujud institusi dan aktivitas pembinaan keagamaan, khususnya bagi kalangan buruh pabrik. Dalam kaitan ini, ada semacam “arus balik” dari kegandrungan terhadap janji-janji dan bayangan indah modernisasi yang ternyata tidak seluruhnya membahagiakan, untuk kembali merindukan nikmatnya di bawah sentuhan tradisionalitas nilai-nilai keagamaan, dengan sejumlah manfaatnya yang justru semakin dirasakan.³⁸ Akhirnya, melalui institusi dan aktivitas pesantren buruh pabrik tersebut, dunia industri pun secara bertahap mengalami religiusisasi atau proses “peng-agamaan” yang ditandai, misalnya oleh penyelenggaraan ibadah Jum’at di masjid umum atau mushalla khusus yang disediakan pihak perusahaan, di samping kesempatan shalat wajib lima waktu, puasa Ramadhan, dan peringatan hari-hari besar Islam yang secara relatif mulai diperhatikan.

Dialog edukatif sebagai dimaksud, antara lain tersimpul dalam wujud kesediaan dan lebih dari itu juga keteguhan hati pihak penge-

³⁸ Tentang pergumulan kaum muslimin Indonesia di awal proses modernisasi, lihat antara lain, Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: Leppenas, 1981), hlm. 49-50.

lola pesantren buruh pabrik, untuk menetapkan tujuan pendidikan bagi kalangan santri-pekerja, dengan memosisikannya di tengah-tengah antara *idealitas maksimal* yang sebaiknya diupayakan dan *realitas minimal* yang kenyataannya bisa diwujudkan. Atau dalam formulasi lain, walau tetap menghormati betapa idealnya jika para santri-pekerja itu mencapai penguasaan maksimal tentang ilmu-ilmu keislaman, apalagi yang bersumberkan langsung dari “kitab kuning” seperti yang biasa terjadi di lingkungan pesantren “tradisional”, namun dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada, maka dianggap cukuplah jika melalui bimbingan itu, mereka akhirnya menjadi pemeluk Islam yang baik, taat menjalankan ajaran agama di tengah kesibukan kerja sehari-hari.

Juga merupakan hasil dialog sebagai dimaksud, ketika muncul aspirasi sedemikian rupa, agar pengembangan pesantren buruh pabrik ke depan, selain tetap memegang teguh nilai-nilai dasar keislaman secara tradisional juga perlu dilengkapi dengan program pendidikan dan pelatihan santri-pekerja dalam hal perluasan pengetahuan secara umum, di samping penguasaan keterampilan teknik yang relevan dan mendukung keberhasilan mereka dalam menjalani profesi kerja sehari-hari. Keinginan semacam ini, sekaligus merupakan *kritik* atau *koreksi* terhadap dunia pesantren tradisional, yang cenderung konservatif, isolasionis, kurang produktif, dan tidak peka terhadap perubahan zaman dan tuntutan masyarakat.³⁹ Dengan mendasari kemunculannya pada kreativitas internal dan sekaligus kritik eksternal, baik kepada dunia industri-modern yang dinilainya cenderung sekuler atau memberontak pada agama,⁴⁰ maupun kepada dunia pesantren tradisional yang

³⁹ Kritik terhadap pesantren tradisional, lebih jauh, lihat, Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 112.

⁴⁰ Kehadiran modernisasi dengan aspek ikutannya sebagai “pemberontak militan” terhadap agama, bisa dilihat, Fazlur Rahman Ansari, *Islam dan Peradaban Barat Modern*, alih bahasa Asmara Hadi Usman, penyunting Anwar Rasyidi, (Bandung: Risalah, 1986), hlm. 32.

belum sepenuhnya terhindar dari segi-segi kelemahan tersebut di atas, maka jadilah sosok pesantren buruh pabrik dalam penampilan riilnya seperti yang ada sekarang ini.

Sebagai konsekuensi logis dari produk dialog yang minimal untuk sementara telah mewarnai ciri khas dan identitas kemunculannya, maka kehadiran pesantren buruh pabrik seolah membawa pesan agar dunia industri modern menyadari, bahwa hakikat kehidupan yang sejatinya tidaklah cukup dengan semata-mata disikapi oleh kesibukan rutin di tengah derunya mesin produksi, melainkan harus diselaraskan secara berimbang dengan kesadaran pelakunya bahwa nun jauh di sana masih ada kehidupan lain yang lebih kekal-abadi, dan karenanya diperlukan bekal persiapan secara proporsional. Sementara, terhadap kaum santri yang masih lengket dengan tradisionalitasnya juga diperlukan pemahaman akan pentingnya memposisikan diri secara arif dan bijaksana di tengah realitas kemajuan zaman dewasa ini. Begitulah pendidikan afektif yang teramat mendalam, dengan sasaran finalnya tidak lain adalah kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun kelak di akhirat.

4. Dialog Kultural

Ungkapan cukup populer bahwa dunia pesantren merupakan *subkultur* di celah-celah keumuman budaya komunitas negeri ini, sesungguhnya menyiratkan pengertian betapa kehadiran institusi tersebut memiliki ciri khusus yang berbeda atau minimal dapat dibedakan dari realitas tata kehidupan di sekitarnya.⁴¹ Tetapi dengan begitu, sekaligus juga memungkinkan terjadinya dialog kultural, proses saling mempengaruhi di antara keduanya, yang berujung pada pembentukan tata nilai atau bahkan sebuah kultur baru yang

⁴¹ Uraian lebih mendetail, lihat, Abdurrahman Wahid, "Pesantren Sebagai Subkultur," dalam Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 39-60.

disepakati dan selanjutnya eksis di tengah masyarakat.⁴² Demikianlah, apa yang sesungguhnya terjadi dan melatar belakangi munculnya institusi dan aktivitas pembinaan keagamaan untuk kalangan pekerja di kawasan industri, yang dalam studi ini disebut sebagai pesantren buruh pabrik.

Barangkali dengan tujuan mewujudkan idealitas budaya yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, dunia pesantren tradisional sebagaimana yang biasa terlihat selama ini, cenderung menampilkan diri dalam sebuah komunitas edukatif-religius sedemikian rupa, di mana pihak kiai, para ustadz dan kalangan santri mengenakan busana khas, misalnya berbaju lengan panjang, berkain sarung, dan selalu menutup kepala dengan songkok, kopiah, atau sorban. Boleh dikatakan, *sarung* dan *kopiah* merupakan identitas budaya pakaian yang sangat menonjol di lingkungan pesantren, khususnya yang termasuk kategori “tradisional.” Sementara, kehidupan dunia industri yang mengusung nilai-nilai kemodernan, cenderung melihat apa yang tergambar di atas sebagai tradisi masa lalu yang sudah ketinggalan zaman.

Tanpa jembatan dialogis yang dapat menciptakan netralitas pemahaman di antara keduanya, mungkin saja yang terjadi adalah saling menjelek, mencela, merendahkan atau bahkan menghina. Apa yang di masa lalu sering dicibirkan dengan sinis, bahwa kalangan santri adalah “*kaum sarungan*”, dengan konotasi negatif sebagai kelompok orang kolot, tidak berilmu alias bodoh, dan selalu menentang setiap ide dan langkah modernisasi, sesungguhnya merupakan bukti adanya benturan kultural sebagai dimaksud. Tidak kalah sengitnya, kalangan santri pun mempunyai penilaian yang buruk dan kemudian menuduh balik mereka yang *sok modern* semacam itu sebagai hamba dan pengikut paham kafir, pencari

⁴² *Ibid.*, hlm. 40.

kepuasan duniawi tanpa batas, pengabdikan kepentingan perut, orang sesat dan menyesatkan.

Dalam perspektif kaum santri dan sekaligus masyarakat industri modern, kehadiran pesantren buruh pabrik, dalam banyak kasus dapat mencairkan kebekuan dialogis tersebut, misalnya dalam wujud munculnya pemahaman sedemikian rupa, bahwa soal busana sebenarnya menyangkut selera atau pilihan seseorang, yang penting selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip “*menutup aurat*” menurut konsep dan ketentuan ajaran Islam. Terapannya dalam tata kehidupan sehari-hari di kalangan santri-pekerja terlihat sedemikian luwes, sesuai keperluan, tempat, dan keadaan, apakah ketika sedang berada di lingkungan pesantren dengan segala aktivitas rutin yang dijalannya, ataukah pada saat melaksanakan kewajiban kerja di pabrik atau perusahaan.

Ketika sedang belajar, melaksanakan shalat, dan istirahat santai di pesantren, kain sarung adalah pilihan rasional, karena memiliki unsur kelonggaran, tidak terasa ketat di badan, mudah digunakan, dan gampang pula merawat atau mencucinya. Akan tetapi pada saat menjalani kesibukan sehari-hari di pabrik, maka celana panjanglah yang lebih cocok untuk dikenakan, karena selaras dengan etika kerja yang dikenal selama ini, memenuhi unsur kelincahan, tidak mengganggu dan membahayakan pemakainya. Bayangkan, kalau memaksakan bekerja di pabrik dengan mengenakan sarung, jelas akan terlihat kurang praktis, tidak gesit dalam bertindak, bisa menjerat pemakainya, tersangkut ke mesin produksi, atau lebih dari itu dapat juga menjadi penyebab kemungkinan terjadinya kebakaran.

Karenanya tidak ada keharusan sedemikian ketat, bahwa santri-pekerja mesti selalu berkain sarung, berbaju lengan panjang, dan berpeci atau berkopiah. Malah bukan sekedar dalam hal berbusana semacam itu, yang sengaja diatur secara fleksibel

sebegitu rupa, melainkan bisa saja mereka pulang ke pesantren dengan membawa peralatan kerja tertentu seperti obeng, kunci, dan gunting, asal penempatannya tidak sampai mengganggu, sesuai dengan kapasitas ruangan atau kamar yang tersedia. Dari fleksibilitas semacam inilah, ciri khas pesantren buruh pabrik akhirnya menjadi tampak jelas, yakni cenderung mengakomodasikan idealitas serta citarasa kultural dunia santri di satu pihak, dan kepentingan praktis dunia kerja di lingkungan pabrik atau perusahaan pada pihak yang lain.

Tata kehidupan kultural di pesantren buruh pabrik, juga tercermin dari ketatnya jadwal kegiatan santri-pekerja sehari-hari, baik dalam rangka menjalani kewajiban belajar di lingkungan pesantren, maupun memenuhi keharusan dan beban kerja di perusahaan, yang kesemuanya itu jelas menuntut sikap cermat dan penuh kedisiplinan. Sebuah kultur modern yang dijiwai oleh prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan waktu dan tenaga guna mencapai tujuan tertentu, kelihatannya telah ikut mewarnai kehadiran lembaga tersebut. Kecenderungan semacam itu berbeda misalnya, jika dibanding dengan kebiasaan yang berlaku di sementara pesantren konvensional, lebih-lebih yang hanya menyelenggarakan pengajaran “kitab kuning” dengan metode *wekton* dan atau *bandongan*⁴³ sedemikian longgarnya aturan bagi santri, untuk mengikutinya atau tetap tinggal di kamar pemondokan karena memang tidak diabsen, maka kecenderungan yang terjadi adalah: mereka bebas dalam hal belajar dan sekaligus juga bebas untuk tidak belajar.

Keharusan untuk bersikap disiplin di kalangan santri-pekerja, misalnya terlihat dari kebiasaan untuk selalu bangun pagi menjelang subuh, kemudian shalat berjama’ah, makan pagi, memper-

⁴³ Tentang metode pengajaran seperti *sorogan*, *wekton* dan *bandongan* di lingkungan pesantren tradisional lihat, Sudjoko Prasodjo, hlm. 6-7.

siapkan diri ke tempat kerja, berangkat ke pabrik, dan baru pulang di sore atau bahkan malam hari. Sehabis shalat 'Ashar, istirahat sejenak, shalat magrib, mengikuti kegiatan belajar, shalat Isya', kemudian tidur sampai menjelang subuh berikutnya. Bagi yang menjalani *shift* kerja malam hari, kehati-hatian dan sikap disiplin justru perlu ditingkatkan, mengingat ada kalanya harus berangkat ke pabrik di tengah malam, sehingga jika tidak waspada bisa saja terjangkit rasa mengantuk kemudian tertidur dan akhirnya gagal memenuhi tugas kerjanya. Belum lagi, di sela-sela kesibukan tersebut, mereka harus pula mengurus berbagai keperluan hidup sehari-hari.

Jika kebiasaan cermat dan penuh disiplin itu dipahami sebagai pengaruh kultur industri-modern, maka sebaliknya ada pula tata budaya santri yang masuk dan ikut mewarnai atmosfer kehidupan di tempat kerja mereka. Dalam kaitan ini, kecenderungan sementara pengelola pabrik untuk berlaku toleran, dengan mengizinkan dan bahkan ada yang mendorong kalangan buruh perempuan untuk mengenakan *penutup kepala*, *kerudung* atau *jilbab* ketika mereka bekerja, adalah gejala cukup menarik dalam konteks dinamika hubungan kultural antara dunia pesantren dengan industri dan antara Islam dengan modernisasi. Oleh karena, busana muslimah seperti mengenakan jilbab, apalagi di kalangan pekerja industri, jelas merupakan tradisi baru yang justru muncul di tengah proses modernisasi negeri ini.

Diberikannya kesempatan bagi pekerja perempuan untuk mengenakan jilbab ketika sedang bekerja, ternyata didasari oleh beberapa alasan. Di antaranya, kesopanan dalam berbusana dipahami berkorelasi positif dengan keteguhan, kejujuran, kerapian, dan kedisiplinan pihak pemakainya. Dengan berpakaian semacam itu, diharapkan dapat mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya godaan laki-laki dan kemungkinan perilaku

menyimpang pada umumnya, sehingga konsentrasi terhadap pekerjaan menjadi terfokus, dan akhirnya melahirkan produktivitas maksimal. Tetapi ada pula yang berangkat dari niat baik untuk menghormati keyakinan seseorang, sekaligus mengembangkan tenggang rasa budaya, sebagai faktor penting bagi terjalannya saling pengertian, terbentuknya kesadaran untuk menjaga dan melindungi satu sama lain, yang kesemuanya itu akan bermuara pada terciptanya keamanan dan keselamatan bersama.

E. Pemaknaan Sosio-Religius

Dalam konteks ilmu-ilmu sosial keagamaan, kehadiran pesantren buruh pabrik dan kemungkinan pengembangannya di masa depan, mempunyai titik relevansi sedemikian rupa untuk menambah dan terus memperkaya informasi, dalam wujud pernyataan teoretis yang dibangun atas dasar temuan dan realitas empiris. Persoalan mendasar yang menjadi pintu masuk untuk sampai ke maksud tersebut, dalam kaitan ini adalah hubungan antara *pesantren* dengan *industrialisasi* dan antara *Islam* dengan *modernisasi*. Melalui pemaparan secara kritis tentang segi-segi kelemahan industrialisasi dan modernisasi, pemaknaan sosio-religius ini diarahkan untuk mengungkap nilai-nilai konstruktif yang dapat disumbangkan oleh institusi keagamaan tertentu, dalam hal ini pesantren buruh pabrik, guna mencapai alternatif jalan pemecahannya.

Menurut Henry Fratt, industrialisasi bisa didefinisikan sebagai suatu proses perkembangan teknologi oleh penggunaan ilmu pengetahuan terapan, ditandai dengan ekspansi produksi secara besar-besaran melalui pemanfaatan tenaga permesinan, untuk tujuan pasar yang luas bagi barang produsen maupun konsumen, dengan bantuan angkutan kerja yang terspesialisasikan secara jelas, di mana kesemuanya itu disertai oleh gerak urbanisasi

yang terus meningkat.⁴⁴ Sesuai dinamika dan sifat internalnya, industrialisasi terkait erat dengan perubahan sosial di suatu masyarakat, yakni pergeseran tata hidup komunitas pelakunya: dari bercorak *gemeinschaft* ke arah *gesellschaft*, dari hubungan natural keluarga desa bergerak ke arah hubungan artifisial kehidupan kota, dari kontak organis antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kehangatan menjadi terisolasi sedemikian rupa dalam semangat kompetisi untuk meraih sebanyak mungkin keuntungan pribadi.⁴⁵ Beserta perubahan di bidang ekonomi lewat industrialisasi, terjadi pula pergeseran yang demikian kompleks dalam hal tata kehidupan masyarakat, seperti tentang kelompok sosial, mobilitas penduduk, urbanisasi ke kota, status pekerjaan dan keahlian pekerja, kebiasaan dalam konsumsi barang, konflik antarkelas atau kelompok sosial, perubahan kedudukan perempuan, melemahnya tradisi setempat, dan rusaknya kebiasaan serta moralitas masyarakat.⁴⁶

Seperti yang kita saksikan dewasa ini, industrialisasi yang berhimpit arah dan tujuan dengan modernisasi, telah melakukan penetrasi ke hampir seluruh aspek kehidupan manusia: fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Dengan kata lain, modernisasi telah menjadi revolusi kemanusiaan, dengan jaringan yang amat luas jangkauannya dan begitu mempengaruhi kehidupan manusia sejagad.⁴⁷ Sementara modernisasi merupakan perpanjangan dan perluasan konsep-konsep kehidupan dalam wujud

⁴⁴ Henry Fratt, et.al, *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, (Totowa, New Jersey, 1970), hlm. 155.

⁴⁵ Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, penyunting, Agus Edi Santoso, (Bandung: Penerbit Mizan, 1987), hlm. 141.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 140.

⁴⁷ Lihat, antara lain Fachry Ali, "Fisi Politik dan Intelektual Umat Islam Indonesia Dalam Proses Modernisasi," dalam Muslih Usa & Aden Wijdan SZ, *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1997), hlm. 147.

rekonstruksi pengalaman masyarakat Barat, yang selama ini dikenal berpandangan hidup sekuler dan berorientasi keduniaan semata. Oleh dan berkat dukungan kekuatan-kekuatan teknologi, ekonomi, politik, dan terutama militer, konsep tersebut akhirnya tersebar luas, tercangkokkan sedemikian rupa, dan akhirnya menghipit perkembangan tata hidup serta kebudayaan masyarakat non-Barat.⁴⁸

Meskipun secara umum proses industrialisasi dipandang bernilai positif bagi kesejahteraan lahiriah manusia, akan tetapi belakangan ini mulai timbul sikap kritis, meragukan, mencela, atau bahkan mengutuk gerakan tersebut sebagai penyebab merajalelanya sikap hidup materialistis, individualistis, dan hedonistis, terjadinya polusi lingkungan, eksploitasi sentimen perasaan rendah dan amoral, semakin dahsyatnya peperangan dengan senjata pemusnah massal, dan lain sebagainya. Memang dalam kenyataannya, industrialisasi dan modernisasi cenderung mengandung ekses negatif, di samping segi-segi positifnya. Ekses tersebut muncul, akibat dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan sosok manusia “tanpa perasaan”, mengingkari realitas perseorangan (*depersonalization*), mendegradasikan harkat kemanusiaan (*dehumanization*), dan pada akhirnya menimbulkan keterasingan (*alienation*) seseorang di tengah-tengah lingkungannya sendiri.⁴⁹

Terhadap nasib kehidupan kalangan pekerja, dunia industri modern sebenarnya juga memiliki banyak kelemahan. Oleh karena, dengan adanya manajemen administrasi yang sedemikian ketat, kerutinan kerja yang membosankan, memposisikan manusia sekedar sebagai instrumen produksi, membuatnya berada dalam kedudukan ibarat komponen mesin industri sendiri, tanpa pilihan dan alternatif lain, yang berarti telah kehilangan diri sendiri. Jika

⁴⁸ Henry Fratt, et.al, *Dictionary of Sociology*, hlm. 155.

⁴⁹ Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. 124.

kehadirannya dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, maka tidak berarti apa-apa. Ia digunakan atau dibuang, semata berdasarkan fungsi kerja yang dapat dilakukannya, sedang kemanusiaannya secara intrinsik tidak menjadi hitungan. Di sinilah, akhirnya timbul pertanyaan tentang makna hidup dan kehidupan yang sesungguhnya.

Untuk memperoleh pemecahan yang tepat, maka agamalah jawabannya. Karena, menurut Abdurrahman Wahid, agama memiliki sasaran ideal bagi kehidupan manusia, sasaran yang mana dibentuk oleh pandangan dunia dan etos pengabdian yang berkembang dalam hidup keagamaan para penganutnya. Keyakinan agama memberikan bekas yang seringkali amat mendalam, sehingga mampu mengontrol dan memberi arah terhadap perilaku seseorang, untuk senantiasa berpegang teguh padanya di tengah kehidupan yang terkadang sulit dan terus mengalami perubahan.⁵⁰ Keyakinan agama, pada gilirannya melahirkan institusi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan penganutnya. Lembaga itu menciptakan dalam dirinya mekanisme untuk menangani berbagai masalah kehidupan dari sudut pandang keagamaan, misalnya dengan menyusun program peningkatan kualitas umat di bidang pendidikan, pelayanan sosial, dan lain sebagainya.⁵¹

Seorang filosof dan sekaligus negarawan Perancis, Andre Malaux, pernah meramalkan bahwa tahun dua ribuan ke atas merupakan abad agama. Manusia tidak bakal *survive* ketika itu, apabila nilai-nilai agama tidak diaktualisasikan kembali dalam setiap langkah kehidupan. Dalam banyak kawasan dunia belakangan ini, terlihat jelas bahwa intensitas keberagamaan masyarakat semakin tinggi. Gejala tersebut, antara lain merupakan reaksi terhadap

⁵⁰ Lihat, Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, hlm. 6.

⁵¹ Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. 124.

paham *materialisme* yang eksklusif dari sebagian besar ideologi sekuler yang bersaing pada abad ke-20 yang lalu. Kecenderungan semacam itu, sekaligus juga merupakan reaksi balik dari berkembangnya *developmentalisme*,⁵² yang ternyata tidak sepenuhnya berhasil membahagiakan umat manusia dalam arti yang luas dan seutuhnya.

Dengan semakin menguatnya gairah keagamaan akhir-akhir ini, sementara gerak industrialisasi dan modernisasi pun sulit atau bahkan mustahil dihentikan, akhirnya mendorong upaya di kalangan sementara pihak untuk menelaah kembali, apa yang pernah dihasilkan oleh para ahli terdahulu ketika menggali dan merumuskan segi-segi keterkaitan di antara keduanya, seperti yang dilakukan oleh Max Weber dalam studinya tentang etika Protestan. Hasil studi tersebut, intinya adalah sebuah tesis yang menyatakan adanya hubungan antara keberagamaan Protestan (khususnya aliran Calvin) dengan semangat modernisasi, atau tepatnya kebangkitan kapitalisme modern. Menurut Weber, kapitalisme merupakan imbalan sosial bagi teologi Calvinis, yang dimulai dari memahami *calling* (takdir) bukan sebagai keadaan di mana seseorang telah ditentukan nasibnya sedemikian rupa oleh Tuhan yang adalah berdosa untuk melawannya, melainkan suatu panggilan keagamaan dalam wujud kesibukan dan usaha yang dipilih sendiri oleh seseorang dan diperjuangkan sekuat tenaga disertai penuh rasa tanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa. Bagi teologi Calvinis, kegiatan usaha ekonomi tidak dipandang sebagai merusak jiwa atau keimanan seseorang, justru sebaliknya mengandung dimensi kesucian. Ketamakan dan keserakahan duniawi, kalau *toh* ada segi bahayanya terhadap kebersihan rohani, namun tidaklah begitu berat jika dibanding dengan sikap bermalas-malasan. Menurut paham ini, mengejar kekayaan ekonomi disertai sifat

⁵² Lihat, Soedjatmoko, "Masa Depan Manusia: Antara Transendensi dan Histori," dalam, *Majalah Panji Masyarakat*, No.543, Jakarta: edisi 21 Juni, 1987, hlm. 45.

rajin, hemat, sabar dan bijaksana, selain menghasilkan paspor menuju kemakmuran duniawi, juga sekaligus merupakan cita-cita luhur keagamaan.⁵³

Benarkah tesis semacam itu, bahwa agama mempunyai keterikatan atau bahkan menjadi sumber pendorong kemajuan, termasuk di era modern sekarang? Jawab ringkasnya adalah, seperti halnya menarik kesimpulan tentang posisi agama sebagai penghalang modernisasi, ternyata sejauh ini belum memperoleh dukungan ilmiah yang kuat; sebaliknya generalisasi yang menyatakan peran agama tertentu dalam mendorong lahirnya kapitalisme modern, juga terlalu optimis atau malah cenderung berlebihan. Dengan menyadari perlunya sikap kehati-hatian, barangkali yang lebih realistis adalah suatu pemahaman mengenai terjadinya *hubungan dinamis* antara keberagaman tertentu dengan munculnya daya dorong modernisasi. Pemahaman semacam itu pun selainnya harus terus-menerus dikaji ulang, melalui pengamatan mendalam dan penarikan kesimpulan *per kasus*, dan tidak begitu saja merumuskannya sebagai generalisasi.

Bagaimana halnya dengan Islam? Menurut Asghar Ali Engineer, telah menjadi perdebatan dalam kaitan ini. Ada sementara yang berpendapat, tanpa memberikan bukti yang kuat, bahwa Islam lebih banyak menghambat daripada mendukung industrialisasi dan modernisasi. Alasannya, dalam kasus di kalangan umat Islam tertentu pernah ditemukan bukti, bagaimana hambatan tersebut memang sungguh terjadi. Akan tetapi, demikian Engineer, tidaklah logis jika ada satu atau beberapa kasus, kemudian dengan serta-merta dijadikan dasar untuk menarik generalisasi, bahwa itulah sikap Islam dan kaum muslimin pada umumnya.⁵⁴ Di lain

⁵³ Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, 143-144.

⁵⁴ Lihat, Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teori Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, penyunting Nas'ud, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 118.

pihak, ada pula yang berpendapat, atas dasar kenyataan tentang relevansi nilai-nilai Islam dengan modernisme, kiranya cukup alasan untuk mengajukan harapan, bahwa kaum muslimin tidak saja dapat menyertai perjalanan abad kemajuan dewasa ini, tetapi lebih dari itu justru akan memberi sembang positif terhadapnya.⁵⁵

Menurut Ernest Gellner, dari sekian banyak karakter ajaran Islam yang memudahkan kaum muslimin menyertai kehidupan modern, adalah bahwa varian murni utama Islam selalu bersifat egalitarian dan bersemangat keilmuan, sedangkan varian yang mengenal sistem hirarkis seperti kalangan sufi, selamanya cenderung berada di pinggiran. Lebih jauh ia menyatakan, dalam Islam, dan hanya dalam Islam, keterlibatannya pada gerak modernisasi di satu pihak, dan peneguhan kembali identitas lama umat di lain pihak, dapat dilakukan dalam satu bahasa dan perangkat simbol-simbol yang sama. Dunia Islam memang gagal menerobos zaman dan memelopori umat manusia ketika memasuki abad modern, akan tetapi karena watak dasar Islam itu sendiri yang memiliki sedemikian banyak titik relevansi dengan nilai-nilai kemajuan, maka kaum muslimin yang mungkin justru paling besar memperoleh manfaat dari modernisasi.⁵⁶

Masih menurut Ernest Gellner, tradisi agung Islam yang dimilikinya sejak masa lalu tetap bisa dimodernkan, tanpa perlu memberikan banyak konsesi terhadap pihak pengembang modernisme, mengingat kesinambungan sedemikian rupa melalui berbagai dialog intelektual di kalangan pelopor umat sepanjang sejarahnya. Di antara sejumlah agama yang ada, Islam adalah satu-satunya yang mampu tanpa banyak gangguan doktrinal menerima

⁵⁵ Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, 71-72.

⁵⁶ Lihat, Ernest Gellner, *Muslim Society*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), hlm. 5.

kehadiran abad modern.⁵⁷ Gellner, bahkan sampai menyatakan, berkenaan dengan historis Eropa Barat, keadaan justru akan jauh lebih memuaskan seandainya orang-orang muslim dahulu mendapatkan kemenangan dan berhasil mengislamkan semua daratan tersebut.⁵⁸ Barangkali, dengan begitu akan terjadi perbandingan yang indah antara Islam dan modernisasi.

Sedemikian banyak pernyataan teoretis tentang hubungan Islam dan industrialisasi, antara agama dengan modernisasi, namun yang tidak kalah pentingnya adalah, bagaimana realitas hubungan tersebut menampilkan diri secara riil di tengah kehidupan kaum muslimin, lebih-lebih pada era modern sekarang? Dalam kaitan ini, kehadiran *pesantren buruh pabrik*, dengan orisinalitasnya sebagai institusi sosio-edukatif-religius, yang menemukan antara *Islam masa lalu* dengan *modernitas zaman sekarang*, kiranya merupakan contoh kasus yang amat menarik untuk dikaji secara mendalam, bagaimana dan sejauhmana ia mampu dan berhasil melakukan peran strategis guna membangun *idealitas kehidupan di masa depan*.

Jika dihubungkan dengan pemikiran Al-Jabiri, sebagaimana terhimpun dalam teori “Post Tradisionalisme Islam”, kehadiran pesantren buruh pabrik dapat dijelaskan sebagai wujud *pergulatan* antara nilai-nilai religius masa lalu yang terwadahi dan dibungkus oleh tradisi keislaman yang dipegang teguh kalangan santri negeri ini di satu pihak, dengan tuntutan hidup masyarakat era modern yang semakin membutuhkan jasa dan sangat dipengaruhi oleh dunia industrialisasi di pihak lain, sebagai upaya mencari dan merumuskan pijakan yang kokoh, guna membangun kehidupan baru, yang diyakini sebagai ideal di masa

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

⁵⁸ Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. 71-72.

depan.⁵⁹ Simpul pemahaman seperti ini, didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan empiris secara cermat di lapangan, kemudian dilakukan refleksi atau perenungan logis dan sistematis, untuk merumuskan makna teoretis yang terkandung di dalamnya.

Jika hendak dituturkan dalam sebuah alur pikir yang agak rinci, maka fokus permasalahannya tetap saja kembali pada hubungan *Islam* dengan *modernitas*. Dalam kaitan ini, Islam diposisikan sebagai pihak yang tengah menghadapi tantangan, mengingat dengan bergulirnya industrialisasi, yang terjadi adalah munculnya kesadaran tentang betapa penting program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mayoritasnya kaum muslimin; tetapi bersamaan itu, ia pun tidak rela jika dengan industrialisasi, sekaligus juga menimbulkan kehancuran agama dan moral, baik di kalangan mereka yang langsung berperan sebagai pelaku seperti kaum pekerja, maupun pada masyarakat sekitar atau bahkan mencakup lingkungan yang lebih luas. Jadi persoalannya adalah, bagaimana Islam tetap eksis di tengah derap industrialisasi modern, dan sebaliknya program industri modern tidak menimbulkan malapetaka dalam hal religiusitas dan moralitas masyarakat, kaum muslimin pada khususnya.

Dalam perspektif teori “Post-tradisionalisme Islam”, proses industrialisasi yang sedang bergerak cepat sekarang ini, sesungguhnya mengandung dan menimbulkan banyak masalah, di samping segi manfaatnya. Permasalahan itu hanya mungkin diatasi secara tuntas, manakala ada upaya untuk menghadirkan kembali nilai-nilai dan tradisi Islam masa lalu yang benar-benar masih orisinal, belum terkontaminasi oleh dampak negatif industrialisasi sebagaimana yang kini tengah berjalan, sebagai upaya meletakkan dasar

⁵⁹ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso, (Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2000), hlm. 195-196.

berpijak yang kokoh, untuk membangun idealitas masa depan yang lebih baik. Jadi, orisinalitas nilai-nilai dan tradisi Islam masa lalu itu dihadirkan kembali ke panggung sejarah kehidupan masa kini, bukan sekedar dalam fungsinya sebagai alat untuk memberikan kritik terhadap berbagai penyimpangan tata kehidupan yang ada karena pengaruh modernitas, melainkan sekaligus juga sebagai peletak pondasi yang kokoh untuk membangun batu loncatan guna merancang idealitas masa depan sesuai apa yang dicita-citakan oleh ajaran Islam.⁶⁰

Melacak alur pikir logis tentang posisinya semacam itu, maka kehadiran “pesantren buruh pabrik,” dapat diibaratkan perannya sebagai pembangun sebuah jembatan guna merintis “*jalan tengah*” dalam penyelesaian berbagai masalah yang ditimbulkan oleh hubungan Islam dengan modernitas. Dinyatakan demikian, mengingat *konseptualisasi* rancangan edukatif-religius dan *aktualisasinya* dalam pembinaan santri-pekerja, boleh dikatakan keseluruhannya didasarkan atas pertimbangan yang cermat dan hati-hati, dengan maksud untuk mendapatkan hasil serta manfaat yang sebesar-besarnya, tanpa mengakibatkan tersinggung, melukai, atau merugikan pihak-pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan institusi dan aktivitas pendidikan Islam itu. Mengajak manusia ke jalan Tuhan dengan cara bijaksana (*bi al-hikmah*), kelihatannya menjadi pegangan, sekaligus merupakan salah satu makna penting dari apa yang dimaksud sebagai prinsip “*jalan tengah*” tersebut.

Di atas prinsip “*jalan tengah*” itulah, pesantren buruh pabrik menempatkan kesadaran tentang segi-segi kelebihan sekaligus kekurangan yang ada pada dirinya, sebagai sesuatu yang penting untuk dipahami oleh semua pihak, baik yang terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari di lembaga pesantren tersebut,

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 196-197.

maupun kalangan luar yang sekedar memiliki kepentingan dengannya secara umum dan bersifat aksidental. Sebagai konsekuensi logis, kehadirannya tidak disertai pretensi untuk mengidentifikasi diri secara penuh dengan “pesantren konvensional” yang dikenal selama ini, karena menyadari terdapatnya unsur-unsur perbedaan, seperti ketidakmungkinannya untuk menjadikan “kitab kuning” berfungsi mutlak sebagai sumber pengajaran keislaman di kalangan santri pekerja, mengingat berbagai keterbatasan yang ada. Tetapi justru karena itulah, dunia industri atau kaum buruh pada khususnya berani mendekat, tertarik, masuk, dan siap menjadi santrinya.

Pemaknaan lebih lanjut dari prinsip “jalan tengah,” misalnya adalah pada saat kehadiran pesantren buruh pabrik mengambil peran sebagai penghubung masa kini dengan masa lalu dan sekaligus masa depan, maka dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan itu merupakan langkah “*tawassul*”, dalam arti usaha membangun hubungan dan menyambung kembali realitas kehidupan kaum muslimin di zaman ini dengan mengoreksi dan mengkritisnya berdasarkan nilai-nilai dan tradisi Islam masa lalu, sebagai pijakan ideologis dan sekaligus teoretis untuk merancang idealitas kehidupan di masa depan. Ketika institusi tersebut berupaya membuka dan menempuh jalan tengah dalam menyelesaikan berbagai kepentingan yang berbeda, dapatlah dinamakan peran itu sebagai kegiatan “*tawassuth*”, artinya berlaku arif-bijaksana dalam seluruh langkah yang ditempuhnya guna mencapai tujuan. Sementara, tidak dilakukan kesemuanya itu, kecuali di atas prinsip “*tawazzun*”, yakni mengusahakan terwujudnya keseimbangan hidup manusia dalam arti yang seluas-luasnya, tercakup misalnya: fisik-mental, material-spiritual, lahir-batin, individual-kolektif, dan dunia-akhirat.

Kehadiran pesantren buruh pabrik, dengan demikian mengemban tiga peran sekaligus: *tawassul*, *tawassuth*, dan *tawazzun*. Peran *tawassul* (membangun hubungan) dengan

orisinalitas masa lalu dan idealitas masa depan, adalah yang paling awal dilakukan, sebagai modal dan bekal yang amat berharga untuk sampai pada *tawassuth* (*menempuh jalan tengah*), kiranya tepat untuk diposisikan sebagai *kunci* atau *sentral* dari kedua sisi kanan-kirinya yang lain, yakni *tawassul* (*membangun hubungan baik*) dan *tawazzun* (*menjaga keseimbangan hidup*). Alur logikanya, dengan menempuh jalan tengah (*tawassuth*), maka segala langkah yang dilakukan oleh pesantren buruh pabrik, diharapkan berhasil maksimal sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Untuk sampai ke arah dan mencapai kemampuan tersebut, diperlukan langkah membangun hubungan baik (*tawassul*) dengan masa lalu, guna mencapai idealitas masa depan. Melalui keseimbangan hidup yang selalu terjaga (*tawazzun*), semuanya akan berlangsung mulus sesuai ajaran Islam.

Dalam realitasnya, aktualisasi konsep “jalan tengah” tersebut di lapangan, cukup memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan institusi dan aktivitas pesantren buruh pabrik. Oleh karena, seluruh hal yang terkait dengan perwujudan konsep tersebut, sesungguhnya menyangkut dan berhubungan sedemikian rupa dengan kebutuhan amat mendasar pada masing-masing pihak sebagai dimaksud. Menurut Abraham Maslow, adalah penting atau bahkan mutlak bagi setiap orang memperoleh jaminan bagi terpenuhinya kebutuhan dasar untuk dapat menjalani kehidupan di dunia ini secara wajar, yakni kebutuhan makan dan minum guna mempertahankan hidup (*physiological needs*), kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman (*safety needs*), kebutuhan untuk dihargai sebagaimana mestinya (*esteem needs*), dan kebutuhan aktualisasi diri sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada (*self actualization needs*).⁶¹

⁶¹ Abraham J. Maslow, *Motivation and Personality*, (New York: Van Nostrand Reinhold, 1970), hlm. 52. Juga terdapat dalam, David M. Wulff, *Psychology of Religion*, (New York: John Wilwy & Sons, 1991), hlm. 603.

Bagaimanapun juga, soal makan dan minum, keselamatan dan keamanan, setia-kawan dan cinta, dihargai selayaknya manusia, dan aktualisasi diri di tengah kehidupan, adalah sederet kebutuhan yang bersifat mendasar dan berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Yang namanya santri-pekerja, para ustadz, kiai, pegawai kantor, pengawas produksi, kepala tata usaha, pemilik pabrik, dan warga masyarakat pada umumnya, tidak akan tenang apalagi sukses dalam menjalani pengabdian, tugas, profesi, keahlian, dan kehidupan dalam pengertian luas, kecuali terpenuhi lebih dahulu sejumlah aspek kebutuhan dasar tersebut. Pihak santri-pekerja misalnya, hanya mungkin berhasil melakukan tugas-kewajiban di pabrik dengan baik, manakala sarapan pagi sebelum berangkat, ada jaminan selamat ketika bekerja, perasaannya tidak hancur oleh kegagalan cinta, mendapat penghargaan yang wajar atas pekerjaannya, dan terbuka harapan untuk meningkatkan karier guna mencapai harkat kehidupan yang terus semakin membaik.

Dengan menerapkan prinsip “jalan tengah” secara tuntas, baik di lingkungan pesantren maupun di tempat kerja, seseorang akan berhasil menjadi santri yang baik, sekaligus pekerja berprestasi, dan karenanya berhak mendapatkan semua aspek kebutuhan dasar tersebut sebagaimana mestinya. Begitu pula sebaliknya, dengan terpenuhi sejumlah aspek kebutuhan dasar yang memang sangat atau bahkan mutlak diperlukan, barulah memungkinkan seseorang untuk menjadi santri yang baik, sekaligus pekerja berprestasi, yang karena itulah kembali manfaatnya untuk mendukung kemampuan yang bersangkutan dalam mengaktualkan prinsip “jalan tengah” baik di lingkungan pesantren maupun tempat kerjanya. Begitulah secara melingkar dan terus-menerus, bagaimana prinsip “jalan tengah” itu diwujudkan oleh mereka yang terlibat dalam aktivitas dan institusi pesantren buruh pabrik.

Selanjutnya, tanpa mengurangi pentingnya sejumlah aspek yang lain, kebutuhan dasar kelima atau yang terakhir, yakni

aktualisasi diri (*self actualization needs*), sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena, munculnya sejumlah kritik tajam terhadap industrialisasi modern,⁶² salah satunya dilatarbelakangi oleh kegagalan atau ketidakpeduliannya terhadap kebutuhan dasar manusia khususnya bidang *aktualisasi diri*. Bagi kelompok ini, dengan kecenderungan ditempatkan atau sengaja menempatkan posisinya sebagai *the liberated territory*, wilayah yang terbebaskan dari nilai-nilai spiritualitas,⁶³ dunia industri modern diyakini telah menimbulkan banyak masalah kemanusiaan, seperti menjadikan kaum buruh pada khususnya sebagai hamba mesin (*homo mechanicus*) sebagaimana diintrodusir oleh Erich Fromm,⁶⁴ atau sebagai makhluk satu dimensi (*one dimensional man*) menurut istilah Herbert Marcuse.⁶⁵

Sedemikian banyak kalangan yang merasa prihatin dan menyesalkan kehadiran industrialisasi modern dengan berbagai dampak negatifnya, sebagaimana beberapa di antaranya telah dijelaskan terdahulu, akhirnya ada sementara pihak yang mengusulkan segera berakhirnya zaman yang penuh derita kemanusiaan ini, antara lain dengan merombak atau menata kembali paradigma kehidupan manusia, sehingga lahirlah gagasan baru mengenai apa yang kemudian disebut sebagai “masyarakat pascaindustri”. Dengan menitikberatkan pentingnya mengangkat kembali martabat kemanusiaan yang telah sedemikian merosot atau bahkan hancur di celah-celah deru mesin pabrik, maka salah seorang penggagasnya, Daniel Bell, merumuskan sosok masyarakat pascaindustri, antara lain ditandai oleh adanya upaya

⁶² Lihat, misalnya, Y.B. Mangunwijaya (ed.), *Teknologi dan Dampak Kebudayaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 13-14.

⁶³ Peter L. Berger, hlm. 130.

⁶⁴ Erich Fromm, hlm. 58.

⁶⁵ Lihat, Herbert Marcuse, *One Dimensional Man: The Ideology of Industrial Society*, (Great Britain: Sphere books Ltd, 1969), hlm 37.

peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terus-menerus, untuk menciptakan pekerja profesional di bidangnya melalui kegiatan pendidikan dan training. Masyarakat semacam ini, oleh Bell disebut sebagai “*a game between persons*”, permainan indah orang perorang, yang intinya mengedepankan peningkatan kualitas hidup manusia dalam arti luas, seperti terpenuhinya jaminan kesehatan, keselamatan kerja, perbaikan pendidikan, tersedianya sarana rekreasi, dan penyaluran bakat serta jiwa seni. Termasuk dalam kaitan itu, adalah munculnya kesadaran baru tentang pentingnya menata kehidupan yang ramah dan manusiawi, tidak lagi dikotori oleh sikap egois dan individualistis yang merupakan produk dunia industri modern sebelumnya.⁶⁶

Menurut Bell, mengedepankan idealitas *masyarakat pasca-industri* semacam itu, walaupun masih dalam bentuk konstruk teoretisnya sangat penting dilakukan, karena dapat berfungsi sebagai abstraksi yang memungkinkan bagi munculnya bentuk-bentuk khusus dalam gejala perubahan sosial di seputar dan sepanjang poros industrialisasi. Lebih jauh ia menegaskan, bahwa terma tersebut paling tidak mengandung sebuah “fiksi”, yakni bangunan logika dari apa yang mungkin atau bisa ada (*could be*), yang dengannya realitas sosial bisa diperbandingkan, agar dengan demikian seseorang dapat melihat apa yang sesungguhnya mempengaruhi sebuah perubahan di masyarakat itu dari arah dan sudut pandang tertentu.⁶⁷ Penggunaan terma tersebut secara konsisten oleh Bell dan yang lain, mengindikasikan bahwa “konstruk teoretis masyarakat pascaindustri” telah menjadi bagian dari, dan sekaligus dianggap sebagai, realitas sosial.

Konstruk teoretis masyarakat pascaindustri sebagaimana yang dikemukakan oleh Bell dan kawan-kawan tersebut, memberi-

⁶⁶ Barry Smart, *Loc.cit.*

⁶⁷ Daniel Bell, *The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*, (New York: Basic Books, 1973), hlm. 14.

kan ruang gerak lebih luas bagi turut bermainnya elemen-elemen kemanusiaan di dunia industrialisasi, dan kehidupan masyarakat secara umum. Perwujudannya, antara lain, adalah dengan memosisikan manusia sebagai “subjek teknologi”, dan bukan lagi sekadar “obyek” seperti dalam paradigma sebelumnya. Dengan menempatkan manusia sebagai *subjek* dan bukan lagi sekadar *obyek*, maka dimensi kemanusiaannya menjadi tampil dan teraktualisasikan secara utuh ke permukaan. Pengembangan dunia industri, dengan demikian, mestilah sejalan dan berbanding lurus dengan pengedepanan “dimensi kemanusiaan” di kalangan subjek atau pelakunya, sehingga tercipta masyarakat ideal sedemikian rupa, dalam kesempurnaan struktur kepribadian setiap warganya, tidak mengalami keterbelahan (*split personality*) akibat dimensi kemanusiaannya terampas oleh realitas kerja industri yang bersifat mekanis, tidak manusiawi, dan sekuler. Menurut paradigma ini, kebermaknaan pelaku industri terletak pada diapresiasi nilai-nilai kemanusiaan dalam posisi tidak lebih rendah dari perangkat dan aktivitas industri itu sendiri. Sejalan dengan idealitas kehidupan manusia semacam itulah, Bell merekomendasikan terwujudnya “masyarakat industri baru” yang sadar dan siap kembali kepada “nilai-nilai agama”, sebagai solusi potensial atas masalah kemanusiaan yang diakibatkan oleh krisis modernitas.⁶⁸

Sampai di sini jelas kiranya, betapa kehadiran “pesantren buruh pabrik” dengan segala bentuk aktivitas pembinaan “santri-pekerja” yang selama ini dilakukan, pada kenyataannya memang telah melahirkan efek positif bagi upaya menjadikan atau menarik kembali dunia industri ke idealitas orbit dan atmosfer kehidupan yang dikehendaki, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas kaum muslimin. Dan sebaliknya, dengan kehadiran

⁶⁸ Daniel Bell, *The Cultural Contractions of Capitalism*, (New York: Basic Books, 1976), hlm. 29.

pesantren buruh pabrik itu pulalah, dunia pesantren atau Islam pada umumnya, telah menemukan dan berhasil mengembangkan lahan garap baru, tidak lagi terbatas dan memenjarakan diri pada lingkup tradisionalitasnya masa lalu, melainkan pergi jauh ke sana, merambah ke berbagai penjuru medan kehidupan manusia di zaman modern yang terus mengglobal dewasa ini, sehingga dimungkinkan bakal semakin dekatlah keberhasilan risalahnya, *rahmatan lil 'alamin*, sebagai pembawa dan penebar rahmat bagi sekalian alam.